

**MODUL MATA KULIAH
PENDIDIKAN GENERASI MUDA**



Disusun oleh:

PURWANI PUJI UTAMI, M.PD

1 FEBRUARI 2018

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH TINGGI
KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) KUSUMA NEGARA
2018**

KATA PENGANTAR

Segala Puja-Puji Syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Modul Mata Kuliah Pendidikan Generasi Muda. Dengan adanya modul ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui berbagai pokok pembahasan tentang Pendidikan Generasi Muda. Semoga modul ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan para pembacanya pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu semua masukan, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan modul ini. Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan wawasan keilmuan dan memberi ide-ide baru untuk pembahasan lebih lanjut.

Jakarta, Februari 2018

Purwani Puji Utami, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
MODUL I. AWAL PERTUMBUHAN ORGANISASI PEMUDA	4
MODUL II. LAHIRNYA SUMPAH PEMUDA.....	19
MODUL III. PEMUDA DIGERBANG KEMERDEKAAN.....	29
MODUL IV. SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA.....	42
MODUL V. PEMUDA DAN KONFLIK POLITIK	63
MODUL VI. KRISIS POLITIK DAN PERJUANGAN.....	81
MODUL VII. PEMUDA DAN PENGALAMAN BERPOLITIK MAHASISWA.....	89
MODUL VIII. KONFERENSI MAHASISWA ASIA AFRIKA.....	102
MODUL IX. TRI TUNTUTAN RAKYAT (TRITURA).....	111
MODUL X. SUPERSEMAR	120
MODUL XI. LAHIRNYA KAMI DAN KNPI.....	125

MODUL I

AWAL PERTUMBUHAN ORGANISASI PEMUDA

A. Latar Belakang Lahirnya Organisasi Pemuda

Sejak menginjakkan kakinya di bumi Indonesia pada tahun 1596, penjajah Belanda kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi (orang-orang Indonesia). Mereka terus mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia, tanpa mau memperhatikan nasib rakyat itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, Conrad Theodore Van Deventer (seorang ahli hukum) mengkritik keadaan itu melalui salah satu karangannya yang berjudul Utang Budi.

Van Deventer antara lain menyatakan bahwa kemakmuran Belanda diperoleh berkat kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Belanda sebagai bangsa yang maju dan bermoral harus membayar utang budi kepada bangsa Indonesia. Caranya adalah dengan menjalankan Politik Balas Budi atau dikenal dengan sebutan Politik Etis.

Politik Etis yang diusulkan oleh Van Deventer berisi tentang perbaikan-perbaikan dalam bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (pindahan), dan edukasi (pendidikan). Akan tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan kebudayaan yang halus sekali. Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Politik Asosiasi yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah jajahan dengan kebudayaan penjajah.

Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari Politik Etis telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk golongan pribumi. Tujuannya adalah untuk memperoleh tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah dari pada tenaga bangsa-bangsa Belanda. Banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah telah menghasilkan kaum cerdik pandai dikalangan penduduk pribumi. Kaum cerdik pandai inilah yang mempelopori kesadaran kebangsaan, yaitu suatu kesadaran tentang perlunya persatuan dan kesatuan bangsa.

Peristiwa timbulnya kesadaran berbangsa disebut Kebangkitan Nasional Indonesia. Kaum cerdik pandai ini pula yang memelopori dan memimpin pergerakan nasional pada awal abad ke-20.

B. Organisasi Pemuda yang Tumbuh pada Masa Pergerakan

Sebelum Indonesia merdeka, negara kita memiliki berbagai organisasi kepemudaan yang beranggotakan para pemuda-pemudi Indonesia baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan. Berikut ini adalah daftar beberapa organisasi perkumpulan pemuda di Indonesia :

a. Perkumpulan- perkumpulan kepemudaan yang bersifat kedaerahan antara lain :

1. Budi Utomo / Boedi Oetomo

Budi Utomo berdiri pada tahun 1908 yang pada awal mula berdirinya merupakan organisasi pelajar yang ruang lingkupnya masih kedaerahan, namun pada perkembangannya berubah menjadi organisasi perkumpulan pemuda nasional.

Pada tahun 1906 di Yogyakarta dr. Wahidin Sudirohusodo mempunyai gagasan untuk mendirikan studiefonds atau dana pelajar. Tujuannya adalah mengumpulkan dana untuk membiayai pemuda-pemuda bumi putra yang pandai, tetapi miskin agar dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan gagasannya tersebut, beliau mengadakan perjalanan keliling Jawa. Ketika sampai di Jakarta, dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa STOVIA. STOVIA adalah sekolah untuk mendidik dokter-dokter pribumi. Mahasiswa-mahasiswa tersebut antara lain Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Gumbrek. Dr. Wahidin Sudirohusodo memberikan dorongan kepada mereka agar membentuk suatu organisasi. Dorongan tersebut mendapat sambutan baik dari para mahasiswa STOVIA.

Pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Gedung STOVIA. Para mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Budi Utomo

artinya budi yang utama. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik melainkan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai intinya. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2. Tri koro Dharmo

Sejak Budi Utomo beralih tangan dari golongan muda ke golongan tua pada kongres pertamanya pada 5 Oktober 1908, timbul rasa ketidakpuasan di kalangan generasi muda. Ketidakpuasan itu didasarkan pada gerak-langkah Budi Utomo yang cenderung konservatif dan kurang menampung aspirasi para pemuda. Atas dasar itu, para pemuda membentuk suatu perkumpulan sendiri yang dapat dijadikan tempat para pemuda dapat dididik untuk memenuhi kewajibannya di kelak kemudian hari. 7 Maret 1915, bertempat di Gedung Boedi Oetomo Stovia Jakarta, para pemuda sepakat untuk mendirikan organisasi pemuda yang berfungsi sebagai tempat latihan bagi calon-calon pemimpin bangsa atas dasar kecintaan kepada tanah airnya. Perkumpulan para pemuda itu diberi nama Tri Koro Dharmo. Tri koro Dharmo adalah sebuah perkumpulan pemuda yang berasal dari Jawa. Tri koro Dharmo didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 oleh R. Satiman Wiryoanjojo, Sunardi, dan Kadarman di gedung kebangkitan nasional. Tri koro Dharmo artinya tiga tujuan mulia (sakti, budi, bhakti).

Adapun tujuan Tri koro Dharmo adalah mencapai jaya raya dengan jalan memperkuat persatuan antar pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Untuk mencapai tujuan, usaha-usaha yang dilakukan Tri koro Dharmo adalah menambah pengetahuan umum bagi anggotanya; memupuk tali persaudaraan antar murid bumi putra sekolah menengah, sekolah guru, dan sekolah kejuruan; membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa budaya Indonesia, khususnya Jawa.

3. Jong Java

Pada tahun 1918, nama Trikoro Dharmo diubah menjadi Jong Java. Kegiatannya berkisar pada bidang sosial, budaya, pemberantasan buta huruf, kependuan, seni, dan lainnya. Pada kongresnya (1922) diputuskan bahwa Jong Java tidak bergerak dalam bidang politik dan anggotanya dilarang masuk partai politik. Namun, masuknya Agus Salim (tokoh SI) menyebabkan Jong Java mulai bergerak dalam bidang politik. Oleh karena itu, ada yang pro dan kontra. Akhirnya, yang setuju bergerak dalam politik mendirikan Jong Islamieten Bond (1925) dengan agama Islam sebagai dasar pergerakan dan menerbitkan majalah Al Noer.

Setelah kongres pemuda I pada tahun 1926, paham persatuan dan kebangsaan Indonesia semakin meningkat di kalangan anggota Jong Java. Pada kongres VII 27-31 Desember 1926 di Surakarta, Jong Java yang diketuai Sunardi Djaksodipuro (Mr.Wongsonegoro) membuat putusan untuk merubah tujuan dan ruang gerak organisasi tersebut.

Tujuan tidak hanya membangun Jawa Raya saja, tetapi pada saatnya nanti, Jong Java juga harus bercita-cita membangun persatuan dan membangun Indonesia Merdeka. Ruang lingkup yang dirambah organisasi tersebut juga mulai memasuki dunia Politik, setelah adanya putusan bahwa anggota yang berusia lebih dari 18 tahun boleh mengikuti rapat-raapat politik, sedangkan yang di bawah 18 tahun hanya boleh mengikuti kegiatan-kegiatan dalam seni, olah raga, dan kependuan.

Pada tahun 1928, organisasi ini siap bergabung dengan organisasi kepemudaan lainnya dan ketuanya R. Koentjoro Poerbopranoto, menegaskan kepada anggota bahwa pembubaran Jong Java, semata-mata demi tanah air. Oleh karena itu, maka terhitung sejak tanggal 27 Desember 1929, Jong Javapun bergabung dengan Indonesia Moeda

4. Jong Islamieten Bond.

Selain organisasi-organisasi pemuda yang berdasarkan ikatan kultural, territorial, dan etnisitas, pada awal abad ke-20 muncul pula organisasi pemuda yang berdasarkan keagamaan. Organisasi itu adalah Jong Islamieten Bond. Berdirinya organisasi ini masih ada hubungannya dengan Jong Java. Raden Sam yang berposisi sebagai ketua, mengundurkan diri setelah pada kongres ke VI Jong Java, dua usul darinya ditolak. Ia kemudian mendirikan perkumpulan Jong Islamieten Bond ini pada 1 Januari 1925. Tujuan pertama pembentukannya adalah untuk mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi para pelajar Islam dan untuk mengikat rasa persaudaraan antara para pemuda terpelajar Islam yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan sebelumnya masih menjadi anggota perkumpulan daerah, seperti Jong Java (7 Maret 1915), Jong Sumatra (9 Desember 1917), dan lain-lain. Anggotanya terbuka antara usia 14-30 tahun, sehingga tidak hanya diisi oleh para pelajar saja. Secara formal, organisasi ini tidak bergerak di bidang politik, namun bagi anggota yang berusia lebih dari 18 tahun, boleh mengikuti kegiatan politik. Kongres pertama organisasi ini dilangsungkan pada 29 Desember 1925.. dari kongres itu, ditetapkan anggaran dasar organisassi dan terumuskannya sebuah tujuan, yaitu :

- a) Mempelajari dan mendorong hidupnya kembali agama Islam.
- b) Memupuk dan menaikkan simpati terhadap para pemeluk agama Islam dan pengikut-pengikutnya di samping toleransi terhadap golongan lain.
- c) Mengorganisasi kursus-kursus Islam, darmawisata, olahraga, dan menggunakan agama senagai pemersatu.
- d) Meningkatkan kemajuan jasmani dan rohani anggota-anggotanya dengan menahan diri dan sabar.

Kongres kedua diadakan di Surakarta pada 24-26 Desember 1926 mendorong para anggotanya untuk lebih ddalam mempelajari Islam sesuai dengan asas dan tujuan organisasi. Kongres ketiga berlangsung di Yogyakarta pada 23-27 Desember 1927. Lebih banyak membicarakan masalah yang dihadapi umat Islam, terutama yang ada kaitannya dengan cita-cita persatuan dan nasionalisme.

5. Jong Sumatranen Bond

Berdirinya Jong Java di Batavia memberikan inspirasi bagi pemuda-pemuda Sumatra yang sedang belajar di Batavia untuk mendirikan organisasi serupa. Jong Sumatranen Bond (JSB) adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatra, mendidik pemuda Sumatra untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatra.

Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan antara lain adalah dengan menghilangkan adanya prasangka etnis di kalangan orang Sumatra, memperkuat perasaan saling membantu, serta bersama-sama mengangkat derajat penduduk Sumatra dengan jalan menggunakan propaganda, kursus, ceramah-ceramah, dan sebagainya.

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. JSB memiliki delapan cabang, enam di Jawa meliputi Batavia, Bogor, Bandung, Serang, Sukabumi, dan Purworejo, serta dua di Sumatra, yakni di Padang dan Bukittinggi. Beberapa tahun kemudian, para pemuda Batak keluar dari perkumpulan ini dikarenakan dominasi pemuda Minangkabau dalam kepengurusannya. Para pemuda Batak ini membentuk perkumpulan sendiri, Jong Batak.

Kelahiran JSB pada mulanya banyak diragukan orang. Salah satu diantaranya ialah redaktur surat kabar Tjaja Sumatra, Said Ali, yang mengatakan bahwa Sumatra belum matang bagi sebuah politik dan umum. Tanpa menghiraukan suara-suara miring itu, anak-anak Sumatra tetap mendirikan perkumpulan sendiri. Kaum tua di Minangkabau menentang pergerakan yang dimotori oleh kaum muda ini. Mereka menganggap gerakan modern JSB sebagai ancaman bagi adat Minang. Aktivis JSB, Bahder Djohan menyorot perbedaan persepsi antara dua generasi ini pada edisi perdana surat kabar Jong Sumatra.

Surat kabar Jong Sumatra terbit pertama kali pada bulan Januari 1918. Dengan jargon Organ van Den Jong Sumatranen Bond, surat kabar ini terbit secara berkala dan tidak tetap, kadang bulanan, kadang triwulan, bahkan pernah terbit setahun sekali. Bahasa Belanda merupakan bahasa mayoritas

yang digunakan kendati ada juga artikel yang memakai bahasa Melayu. Jong Sumatra dicetak di Weltevreden, Batavia, sekaligus pula kantor redaksi dan administrasinya.

Mulanya, dewan redaksi Jong Sumatra juga merupakan pengurus (centraal hoofbestuur) JSB. Mereka itu adalah Tengkoeh Mansyur (ketua), A. Munir Nasution (wakil ketua), Mohamad Anas (sekretaris I), Amir (sekretaris II), dan Marzoeki (bendahara), serta dibantu beberapa nama lain. Keredaksian Jong Sumatra dipegang oleh Amir, sedangkan administrasi ditangani Roeslie. Mereka ini rata-rata adalah siswa atau alumni STOVIA serta sekolah pendidikan Belanda lainnya. Setelah beberapa edisi, keredaksian Jong Sumatra dipisahkan dari kepengurusan JSB meski tetap ada garis koordinasi. Pemimpin redaksi pertama adalah Mohammad Amir dan pemimpin perusahaan dijabat Bahder Djohan.

Surat kabar Jong Sumatra memainkan peranan penting sebagai media yang menjembatani segala bentuk reaksi atas konflik yang terjadi. Dalam Jong Sumatra edisi 12, th 1, Desember 1918, seseorang berinisial Lematang mempertanyakan kepentingan kaum adat. Sambutan positif juga datang dari Mohamad Anas, sekretaris JSB. Anas mengatakan dengan lantang bahwa bangsa Sumatra sudah mulai bangkit dari ketidurannya, dan sudah mulai memandang keperluan umum.

Sumatra memang dikenal banyak menghasilkan jago-jago pergerakan, dan banyak di antaranya yang mengawali karier organisasinya melalui JSB, seperti Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin. Hatta adalah bendahara JSB di Padang 1916-1918. Kemudian ia menjadi pengurus JSB Batavia pada 1919 dan mulai mengurus Jong Sumatra sejak 1920 hingga 1921. Selama di Jong Sumatra inilah Hatta banyak menuangkan segenap alam pikirannya, salah satunya lewat karangan berjudul "Hindiana" yang dimuat di Jong Sumatra no 5, th 3, 1920. Sedangkan Mohammad Yamin adalah salah satu putra Sumatra yang paling dibanggakan. Karya-karyanya yang berupa esai ataupun sajak sempat merajai Jong Sumatra. Ia memimpin JSB pada 1926-1928 dan dengan aktif mendorong pemikiran tentang perlunya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan. Kepekaan Yamin meraba pentingnya bahasa

identitas sudah mulai terlihat dalam tulisannya di Jong Sumatra no 4, th 3, 1920. Jong Sumatra berperan penting dalam memperjuangkan pemakaian bahasa nasional, dengan menjadi media yang pertama kali mempublikasikan gagasan Yamin, mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan.

Semakin besarnya kesadaran nasional dan semakin luasnya penggunaan bahasa melayu di kalangan mereka, maka nama organisasi yang sebelumnya masih menggunakan bahasa Belanda, diganti dengan nama Pemuda Sumatra. Pemuda Sumatra ini memberikan andil cukup besar dalam memperkuat kesadaran berbangsa, khususnya di kalangan pemuda.

6. Jong Ambon

Organisasi Ambon Muda atau Pemuda-pemuda Ambon didirikan pada tanggal 9 Mei 1920. Maksud dan tujuannya adalah menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Ambon (Maluku). Pendirinya adalah A.J. Patty, seorang pemuda dari Maluku. Ia mempersatukan organisasi-organisasi orang ambon dengan menggunakan organisasi yang telah ia dirikan sebelumnya, Serikat Ambon, di Semarang. Karena dianggap menentang kebijakan Belanda, ia ditangkap dan diasingkan ke berbagai tempat seperti Ujung Pandang, Bengkulu, Palembang, dan Flores. Ditangkapnya Patty sedikit menyebabkan kemunduran organisasi tersebut, hingga akhirnya muncul tokoh baru, Mr. Latuharhary.

7. Jong Minahasa

Organisasi pemuda yang didirikan oleh para pemuda pelajar menengah yang berasal dari kelompok etnis Minahasa pada tanggal 24 April 1919 di Jakarta. Jong Minahasa artinya “Minahasa Muda” atau “Pemuda Minahasa”. Maksud dan tujuannya adalah menggalang dan mempererat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda – pemuda (pelajar) yang berasal dari Minahasa.

Organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi yang didirikan sejak tahun 1912 di Semarang, yakni Rukun Minahasa. Di antara pemimpin Jong Minahasa yang paling dikenal adalah Ratulangi. Berdirinya organisasi ini

bermula dari kebutuhan praktis yang selalu menekan kehidupan para pemuda pelajar di perantauan. Kehidupan terpisah dari sanak keluarga dan hubungan dengan lingkungan asing dan orang-orang yang berasal dan latar belakang budaya berbeda-beda menyebabkan mereka mencari keserasian hubungan dengan teman yang berasal dari daerah yang sarna. Dengan kata lain, organisasi pemuda ini bermula dari rasa solidaritas yang primordial itu. Namun, sejalan dengan semakin meningkatnya rasa kesadaran nasional di antara kaum pergerakan, organisasi ini pun tidak luput dari pengaruh politik. Hal ini tampak pada keikutsertaan Jong Minahasa dalam pertemuan pemuda pada tanggal 15 November 1925 di gedung Lux Orientis di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil Jong Java, JSB, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun dan beberapa wakil dari organisasi pemuda lainnya. Dalam pertemuan ini dibicarakan kemungkinan untuk mengadakan pertemuan pemuda yang luas dan mencakup berbagai organisasi. Mereka bersepakat membentuk sebuah panitia untuk mempersiapkan “Kerapatan Besar Pemuda”, yang kelak berkembang menjadi Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Organisasi Jong Minahasa ini tidak berkembang seperti organisasi pemuda lain, karena sedikitnya pemuda pelajar yang berasal dari Sulawesi. Tokohnya yang terkenal antara lain G.R. Pantouw.

8. Jong Celebes (Sulawesi)

Jong Celebes Artinya Celebes Muda atau Pemuda Celebes, yaitu organisasi pemuda-pemuda yang berasal dari seluruh pulau Celebes (Sulawesi), sehingga jangkauannya lebih luas dari Jong Minahasa. Didirikan pada tahun 1912. Maksud dan tujuannya adalah mempererat rasa persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda (pelajar) yang berasal dari Pulau Celebes atau Sulawesi. Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain Arnold Mononutu, Waroruntu dan Magdalena Mokoginta atau dikenal dengan Ibu Sukanto (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama).

9. Jong Batak

Berdiri pada tahun 1926. Dikenal juga dengan nama Jong Bataks Bond, adalah perkumpulan para pemuda yang berasal dari daerah Batak (Tapanuli), yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan persaudaraan di antara para pemuda yang berasal dari daerah tadi serta turut serta memajukan kebudayaan daerah. Salah satu tokoh yang terkenal dari organisasi ini adalah Amir Sjarifudin.

Selain organisasi pemuda daerah diatas, ada pula organisasi pemuda daerah lain seperti Pemuda Betawi, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor.

b. Perkumpulan-perkumpulan kepemudaan yang bersifat nasionalis, antara lain :

1. Serikat Dagang Islam.

Syarikat Islam (disingkat SI) dahulu bernama Sarekat Dagang Islam (disingkat SDI) didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, pada awalnya Organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai kompleks ekonomi rakyat pada masa itu. Tjokroaminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin, dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI). Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan jiwa dagang.
- b) Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
- c) Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
- d) Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
- e) Hidup menurut perintah agama.

Sarekat Islam tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim.

2. Indische Partij.

Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya adalah dr. E.F.E Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. IP bertujuan mempersatukan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tokoh-tokoh IP menyebarluaskan tujuannya melalui surat kabar. Dalam waktu singkat IP mempunyai banyak anggota. Cabang-cabangnya tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menganggap organisasi ini membahayakan kedudukannya. Pada bulan Maret 1913 Pemerintah Hindia Belanda melarang kegiatan IP. Pada bulan Agustus tahun yang sama para pemimpin IP dijatuhi hukuman pengasingan.

3. Partai Nasional Indonesia.

Pada tanggal 4 Juli 1927 para pengurus Algemeene Studie Club (Kelompok Belajar Umum) di Bandung mendirikan perkumpulan baru yang dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia. Mereka adalah Ir. Soekarno, Mr. Sartono, dr. Samsi, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Budiarto, Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Sunario, dan Ir. Anwari. Pada tahun 1928 Perkumpulan ini kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).

PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja.

Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato *Indonesia Menggugat* dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya.

Tahun 1930, Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Moh. Hatta yang tidak setuju pembentukan Partai Indonesia akhirnya membentuk PNI-Baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Ir. Soekarno bergabung dengan Partindo.

C. Kesimpulan

Bahwasannya pergerakan pemuda Indonesia dimulai sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian dikenal sebagai hari Kebangkitan Nasional. Munculnya gerakan-gerakan pemuda pada abad ke-20 di Indonesia tidaklah sendirian, diikuti oleh negara-negara di Asia lainnya yang juga mengalami perubahan yang sama. Perubahan itu terjadi karena masuknya ide-ide baru, sistem pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, disintegrasi tatanan masyarakat lama, teknologi baru dan sebagainya. Munculnya pergerakan pemuda di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya :

- a) Karena perasaan senasib yaitu penderitaan dijajah Belanda selama lebih kurang 3 abad.
- b) Pernyataan Van Deventer melalui karangannya yang berjudul Utang Budi, yang kemudian memunculkan Politik Etis.
- c) Politik Etis / Politik Balas Budi, menghasilkan kaum terpelajar yang kemudian mempelopori berdirinya organisasi gerakan pemuda.

Organisasi gerakan pemuda yang muncul awal mulanya masih bersifat kedaerahan, mereka bergabung dalam organisasi berdasarkan daerah asal mereka. Organisasi tersebut, diantaranya :

- a) Budi Utomo
- b) Trikoro Dharmo
- c) Jong Java
- d) Jong Islameiten Bond
- e) Jong Sumateranen Bond
- f) Jong Ambon
- g) Jong Minahasa
- h) Jong Celebes
- i) Jong Batak

Tapi ada juga organisasi pemuda yang berdiri karena semangat nasionalis, seperti :

- a) Serikat Dagang Islam
- b) Indische Partij
- c) Partai Nasional Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Sularto, ST, Inspirasi Kebangsaan dari Ruang Kelas, Penerbit Buku Kompas, 2016.

Darmadi Hamid, Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Alfabeta Bandung, 2013.

MODUL II

LAHIRNYA SUMPAAH PEMUDA DAN ORGANISASI SETELAHNYA

A. Sejarah Sumpah Pemuda

Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong, Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dsb serta pengamat dari pemuda tiong hoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.

Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat.

Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Dalam sambutannya, ketua PPPI Sugondo Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan

Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoela dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat

pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Pada rapat penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda terdiri dari :

1. Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
2. Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
3. Sekretaris : Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
4. Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
5. Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
6. Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
7. Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
8. Pembantu IV : Johannes Leimena (yong Ambon)
9. Pembantu V : Rochjani Soe' oed (Pemoeda Kaoem Betawi)

Peserta:

Abdul Muthalib Sangadji; Purnama Wulan; Abdul Rachman; Raden Soeharto; Abu Hanifah; Raden Soekamso; Adnan Kapau Gani; Ramelan; Amir (Dienaren van Indie); Saerun (Keng Po); Anta Permana; Sahardjo; Anwari; Sarbini; Arnold Manonutu; Sarmidi Mangunsarkoro; Assaat; Sartono; Bahder Djohan; S.M. Kartosoewirjo; Dali; Setiawan; Darsa; Sigit (Indonesische Studieclub); Dien Pantouw; Siti Sundari; Djuanda; Sjahpuddin Latif; Dr.Pijper; Sjahrial (Adviseur voor inlandsch Zaken); Emma Puradiredja; Soejono Djoenod Poeponegoro; Halim; R.M. Djoko Marsaid; Hamami; Soekamto; Jo Tumbuhan; Soekmono; Joesoepadi; Soekowati (Volksraad); Jos Masdani; Soemanang; Kadir; Soemarto; Karto Menggolo; Soenario (PAPI & INPO); Kasman Singodimedjo; Soerjadi; Koentjoro Poerbopranoto; Soewadji Prawirohardjo; Martakusuma; Soewirjo; Masmoen Rasid; Soeworo; Mohammad Ali Hanafiah; Suhara; Mohammad Nazif; Sujono (Volksraad);

Mohammad Roem; Sulaeman; Mohammad Tabrani; Suwarni; Mohammad Tamzil; Tjahjaja; Muhidin (Pasundan); Van der Plaas (Pemerintah Belanda); Mukarno; Wilopo; Muwardi; Wage Rudolf Soepratman; Nona Tumbel.

Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.

Isi dari Sumpah pemuda Hasil Kongres Pemuda Kedua adalah sebagai berikut:

1. PERTAMA: Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertumpah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia).
2. KEDOEAA: Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa Indonesia).
3. KETIGA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia).

Dalam peristiwa sumpah pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sin Po dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun para pemuda tetap terus menyanyikannya.

B. Arti Sumpah Pemuda

Ketika beraneka-ragam kecenderungan permusuhan atau perpecahan mulai nampak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita, maka mengisi Hari Sumpah Pemuda dengan jiwa aslinya adalah amat penting. Suara-suara negatif sebagai akibat interpretasi yang salah tentang otonomi daerah sudah mengkhianati jiwa Sumpah Pemuda. Demikian juga pernyataan dan kegiatan-kegiatan sebagian dari golongan Islam reaksioner, seperti yang dipertontonkan oleh organisasi/gerakan semacam Front Pembela Islam, Ahlussunah Waljemaah, Majelis Mujahidin Indonesia, KISDI dan lain-lain sebagainya.

Perlulah kiranya selalu kita ingat bersama-sama bahwa Sumpah Pemuda, yang dilahirkan sebagai hasil Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta adalah manifestasi yang gemilang dari hasrat kuat kalangan muda Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama, untuk menggalang persatuan bangsa dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Mereka ini adalah wakil-wakil angkatan muda yang tergabung dalam Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Minahasa Bond, Madura Bond, Pemuda Betawi dan lain-lain. Atas prakarsa Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) inilah kongres pemuda itu telah melahirkan Sumpah yang berbunyi :

“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah-darah yang satu : tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu: bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa yang satu : bahasa Indonesia “.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, sudah terjadi banyak perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, yang dilakukan oleh berbagai suku di berbagai daerah, baik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan pulau-pulau lainnya. Namun, karena perjuangan itu sebagian besar bersifat lokal dan kesukuan, maka telah mengalami kegagalan. Pembontakan PKI di Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur dalam tahun 1926 merupakan gerakan yang menimbulkan pengaruh politik yang lintas-suku dan lintas-agama yang penting (karena juga terjadi di Sumatera Barat). Sumpah Pemuda lahir dalam tahun 1928, ketika puluhan ribu orang telah ditahan dan dipenjarakan oleh pemerintah Belanda sebagai akibat pembontakan PKI dalam tahun 1926. Berbagai angkatan muda dari macam-macam suku dan agama telah menyatukan diri dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda lewat Sumpah Pemuda, ketika ribuan orang digiring dalam kamp pembuangan di Digul. Adalah penting untuk sama-sama kita perhatikan bahwa tokoh-tokoh nasional seperti Moh. Yamin (Jong Sumatranen Bond), Amir Syarifuddin (Jong Batak), Senduk (Jong Celebes), J. Leimena (Jong Ambon), adalah peserta-peserta aktif dalam melahirkan Sumpah Pemuda.

Dan perlulah juga kita catat, bahwa Sumpah Pemuda dicetuskan oleh kalangan muda, ketika Bung Karno aktif melakukan beraneka kegiatan lewat PNI (yang dua tahun kemudian ditangkap Belanda dan diajukan di depan pengadilan Bandung, di mana ia mengucapkan pidato pembelaannya yang terkenal “Indonesia Menggugat”). Jadi, jelaslah bahwa Sumpah Pemuda adalah semacam kontrak-politik berbagai suku bangsa Indonesia, yang diwujudkan secara kongkrit oleh wakil-wakil angkatan muda mereka. Sumpah Pemuda adalah fondasi penting kebangkitan bangsa Indonesia dan landasan utama bagi pembentukan negara Republik Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Sumpah Pemuda

“Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia”, isi dari sumpah pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 di Gedung Oost Java Bioscoop bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sebelumnya masih bersifat sangat kedaerahan. Selain itu sumpah setia ini bertujuan untuk mempersatukan pemuda-pemuda di seluruh tanah air.

Adapun manfaat yang dapat kita petik dari Sumpah Pemuda antara lain sebagai berikut:

1. Semangat kekeluargaan, persatuan, dan persaudaraan antar sesama.
2. Terwujudnya kerukunan antar masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga tidak mudah dipecah belah (di adu domba)
3. Menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap disintegrasi bangsa yang merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

D. Penaatan Sumpah Pemuda Saat Ini

Momen Sumpah Pemuda, pemuda harusnya mengambil pelajaran untuk kemajuan bangsa ke depan, pemuda yang notabene generasi penerus untuk kemajuan bukan untuk terpecah belah. Mahasiswa saat ini dinilai cenderung melupakan sejarah. Kesan itu bisa dirasakan pada sebagian mahasiswa. Disinilah sebenarnya fungsi organisasi pemuda dan kemahasiswaan. Baiknya semua mahasiswa bisa turun serta aktif dalam ormawa, lalu fungsi pengkaderan harus terus ditingkatkan. Rasa cinta tanah air pemuda jaman sekarang juga dinilai masih cukup kurang. Banyak sekali yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cinta tanah air kita, contohnya dengan menggunakan batik, akan tetapi budaya fashion pemuda jaman sekarang lebih memilih untuk mengikuti budaya barat. Selain itu, tawuran antar pelajar maupun mahasiswa merajalela dimana-mana hanya dikarenakan perbedaan suku ataupun golongan. Lalu apa gunanya rumusan Sumpah Pemuda yang kedua yaitu “Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia” Yang terakhir yaitu mengenai Bahasa persatuan kita, yaitu Bahasa Indonesia.

Miris rasanya ketika pemuda yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan, melainkan mengadopsi bahasa-bahasa asing yang menurut mereka terlihat lebih gaul. Dalam kehidupan sehari-hari, wujud cinta tanah air juga dapat berupa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan dengan sesama, Kebanyakan dari kita belakangan ini lebih suka menggunakan bahasa yang –kata banyak orang- disebut bahasa gaul. Misalnya seperti gue elo dibanding aku kamu. Pada 28 Oktober 1928 telah diikrarkan Sumpah Pemuda yang salah satunya dari tiga isinya ialah menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain bahasa gaul, bahasa yang dianggap lebih keren –kata anak muda- ialah bahasa Inggris. Kita tahu bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan kita boleh mempelajarinya, bahkan diajarkan di sekolah. Namun tetap saja bangsa kita adalah bangsa Indonesia, sudah semestinya bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin kita

mengaku sebagai bangsa Indonesia jika kita malah jauh lebih fasih berbicara menggunakan bahasa bangsa lain dibanding bahasa kita sendiri.

Perwujudan lainnya adalah dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita tunduk kepada Sang Pencipta, menghargai sesama manusia, bersikap adil dan beradap, bermusyawarah, dan tidak membeda-bedakan siapa orang dapat juga dikategorikan sebagai perwujudan cinta tanah air. Hal-hal yang tersebut di atas merupakan hal-hal kecil dan sederhana. Namun justru itulah perwujudan cinta tanah air yang semestinya. Kita tidak harus selalu bertempur di medan perang untuk membuktikan kecintaan kita terhadap Indonesia. Namun mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah termasuk cinta kepada tanah air. Pengamalan Pancasila dikatakan sebagai bentuk cinta tanah air karena Pancasila merupakan ideologi nasional. Dan kita, sebagai bangsa Indonesia, tentunya berkewajiban untuk –tidak hanya menghafalkannya, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada lagi yang dapat kita lakukan untuk melawan keprihatinan kita terhadap penerapan Sumpah Pemuda, yaitu dengan menulis. Sebuah karya tulis bisa membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air, misalnya saja melawan sms-an dengan blogger. Bisa juga dengan mengumpulkan tulisan-tulisan yang bisa mengangkat jiwa nasionalisme kita.

E. Organisasi setelah sumpah pemuda

Sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 itu, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kesanggupan bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam kemajuan. Pengaruh Sumpah Pemuda terhadap organisasi pergerakan nasional sangat besar. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah Sumpah Pemuda, semuanya memakai kata “Indonesia” dalam namanya, seperti Partai Indonesia (Partindo) tahun 1931, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) tahun 1931, Partai Indonesia Raya (Parindra) tahun 1935 dan lain-lain. Bahwa partai Sarekat Islam, pada tahun 1929 berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Dengan demikian partai ini lebih menunjukkan corak kebangsaannya.

Bagi organisasi pemuda sendiri, gerakan ke arah persatuan semakin giat diusahakan setelah Kongres Pemuda II. Proses penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional merupakan suatu proses integrasi yang nilainya sangat dalam. Ernest Renan menegaskan bahwa rasa senasib dan sepenanggungan suatu bangsa menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk suatu negara kebangsaan.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa sejak Kongres Pemuda kedua, organisasi-organisasi pemuda kedaerahan mulai memproses untuk menyatukan tekad dan semangat dalam sebuah wadah dan baru berhasil secara tuntas, yaitu pada tanggal 31 Desember 1930 dengan nama organisasi Indonesia Muda. Organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi-organisasi pemuda yang dulu ikut melahirkan Sumpah Pemuda. Adapun tujuan Indonesia Muda adalah mempererat tali persatuan antara segenap pemuda Indonesia yang berbahasa, berbangsa, dan bertanah air satu, Indonesia.

F. Kesimpulan

Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda adalah fondasi penting kebangkitan bangsa Indonesia dan landasan utama bagi pembentukan negara Republik Indonesia. Dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.

Pemerintah menggalangkan gerakan pendidikan karakter. Karena nilai sumpah pemuda menjadi aplikatif ketika dilaksanakan dalam pendidikan karakter di sekolah. Untuk merintis kembali semangat nilai sumpah pemuda, harus dalam tindakan nyata. Yang pertama Dinas pendidikan merumuskan kembali arah PKPB sampai ke bentuk pelaporannya kepada orangtua siswa. Kedua, pada tataran sekolah perlu mengadakan berbagai kegiatan aplikatif untuk mengaplikasikan nilai sumpah pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

Sularto, ST, *Inspirasi Kebangsaan dari Ruang Kelas*, Penerbit Buku Kompas, 2016.

Darmadi Hamid, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Alfabeta Bandung, 2013.

Annafis, Asyifah. (2014). Makalah Sejarah Sumpah Pemuda. (Online), https://www.academia.edu/9746516/Makalah_sejarah_sumpah_pemuda

Kusnodiharjo, Tukijo. (2011). Revitalisasi Nilai Sumpah Pemuda dalam Ranah Pendidikan. (Online), http://bapaktukijo.blogspot.co.id/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_6608.html

MODUL III PEMUDA DI GERBANG KEMERDEKAAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perjuangan bangsa, kepeloporan pemuda selalu tampil sebagai kekuatan penentu. Mereka adalah kelompok intelektual yang karena usia dan tingkat perkembangannya, memiliki idealisme yang tinggi, semangat pengabdian tanpa pamrih, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Meskipun berasal dari latar belakang sosial, budaya, organisasi, namun karena persamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah, mereka menyatukan diri sebagai satu bangsa dan dalam kesatuan itu mereka berjuang bersama-sama melawan penjajah.

Upaya pembentukan bangsa Indonesia sebagai nation telah dirintis oleh para pemuda pada awal abad ke-20, yaitu menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan rakyat melalui menumbuhkan kesadaran nasional dikalangan rakyat melalui organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan alternatif baru perjuangan untuk menghapuskan penjajahan setelah cara lama yaitu perjuangan bersenjata mengalami kegagalan.

Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda selama kurang lebih 350 tahun, dan tentara pendudukan Jepang selama 3,5 tahun untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan. Titik terang menuju terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak setelah Jepang banyak mengalami kekalahan dari Sekutu.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Sistem Pembelajaran

2.1. Gerakan Kemiliteran

Sejak awal pemerintahannya, penguasa Jepang di Indonesia sudah merencanakan untuk mengarahkan pemuda dan pelajar ke dalam gerakan semi-militer. Pada triwulan pertama 1943 Jepang mendirikan organisasi pemuda pertama di Jawa yang diberi nama *Seinendan*. Organisasi ini dipimpin langsung oleh *Syaiko Sykikan*, panglima Angkatan Darat Jepang di Jawa yang bermarkas di Jakarta. *Seinendan* sebagai organisasi yang bertujuan untuk membina para kawula muda Jawa yang memiliki kesadaran akan munculnya kemenangan dalam perang Asia Timur Raya. Ini berarti, bahwa tujuan utama Jepang mendirikan *Seinendan* adalah untuk menyelamatkan pasukan Jepang yang mulai terjepit di berbagai front Asia Pasifik. Untuk itu keberadaan *Seinendan* langsung dipegang oleh *Gunseikan* atau pimpinan pemerintahan militer (Jakarta), dan secara struktural diteruskan di daerah administratif di bawahnya seperti *Syu* (karesidenan), *Koci* (daerah istimewa seperti Yogyakarta), *Ken* (kabupaten), dan *Gun* (kawedanan).

Pemuda yang diperkenankan masuk dalam *Seinendan* adalah para remaja putra yang telah berumur 14-25 tahun. Mereka kemudian diperkenalkan dengan budaya Jepang terutama sekali diharuskan mengikuti latihan-latihan kemiliteran dengan senapan-senapan tiruan dan bambu runcing. Para pemuda lebih diperkenalkan pada cara-cara dan situasi yang keras. Hal ini dimaksudkan untuk membiasakan kedisiplinan, sehingga secara perlahan semangat perang Asia Timur Raya mulai di suntikkan kepada kawula muda Indonesia.

Organisasi pemuda semi-militer yang kedua adalah *Keibondan*, suatu organisasi pemuda (20-35 tahun) yang lingkup kegiatannya membantu tugas-tugas kepolisian berupa penjagaan lalu lintas, pengamanan desa dan tugas-tugas di bidang keamanan dan ketertiban umum lainnya. Latihan yang diberikan kepada *Keibondan* meliputi penjagaan dan penyelidikan terhadap berbagai berita dalam kehidupan sosial, penjagaan kawasan dirgantara, penjagaan wilayah pantai, penjagaan dan bantuan bencana alam, serta penjagaan dan keamanan kampung (Sihombing, 1962: 1933-1934). Organisasi ini ada di

bawah binaan *Keimubu* (Departemen Kepolisian). Pengawasan terhadap keberadaan Keibondan dilakukan secara hierarkhis sampai ke tingkat bawah oleh kepala polisi daerah (Suhartono, 2001: 130).

Dengan meningkatnya suasana ancaman perang antara pasukan Jepang dengan Sekutu menyebabkan gerakan *Keibondan* mulai disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Tidak jarang dimanfaatkan sebagai mata-mata yang mengintip setiap gejala dan fenomena sosial politik yang dianggap menentang kekuasaan pendudukan Jepang. Akibatnya seringkali terjadi salah tangkap, hanya karena yang bersangkutan dicurigai mata-mata musuh. Selain itu, *Keibondan* juga dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghancurkan lawan kepentingan dengan cara membuat tuduhan yang sama. Dengan demikian *Keibondan* selain ikut memperkuat kewaspadaan dan disiplin masyarakat, juga dapat terperangkap ke dalam politik pecah belah. Menjelang akhir 1943 tidak banyak perbedaan antara *Seinendan* dengan *Keibondan*, sebab keduanya juga mendapatkan latihan dasar-dasar kemiliteran, sehingga kedua gerakan barisan pemuda ini dapat dipergunakan untuk tujuan pertahanan. Sekali pun demikian gerakan *Keibondan* yang cukup spektakuler adalah bahwa organisasi ini dikondisikan jauh dari pengaruh kaum nasionalis. Sebaliknya *Seinendan* justru di dalamnya diperkuat oleh nasioanlis muda seperti Sukarni.

Terdesaknya posisi pertahanan pasukan Jepang oleh Sekutu menyebabkan pemerintah Jepang pada bulan April 1943 memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu angkatan perang Jepang (*Heiho*). Berbeda dengan *Seinendan* dan *Keibondan*, kelahiran *Heiho* dimaksudkan untuk kalangan pemuda yang dipersiapkan sebagai barisan kesatuan-kesatuan angkatan perang, sehingga keberadaan *Heiho* dimasukkan sebagai bagian dari ketentaraan Jepang. Oleh karena itu, *Heiho* sering dibawa sebagai tenaga pekerja yang melayani kegiatan angkatan perang seperti memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk. *Heiho* ternyata bukan hanya ada dalam jajaran angkatan darat Jepang, tetapi juga pada angkatan laut. Pada waktu itu, kawasan Indonesia dikuasai oleh tiga tentara, yakni tentara ke-16 untuk pulau Jawa, tentara ke-25 untuk Sumatra,

dan daerah armada untuk Indonesia bagian Timur, maka *Heiho* juga ada pada ketiga satuan ini.

Di beberapa wilayah satuan angkatan perang Jepang ternyata sangat bervariasi persyaratan perekrutan anggota *Heiho*. Di Sumatra yang dapat diterima sebagai *Heiho* adalah para pemuda yang sudah tamat sekolah rendah dan berumur 18-30 tahun. Sementara itu, pada kesatuan tentara ke-16 di Jawa yang diterima adalah para pemuda berpendidikan sekolah menengah yang telah berumur 16-25 tahun.

Kebutuhan pemerintah pendudukan Jepang di bidang militer terutama untuk melatih tingkat perwira di kalangan bangsa Indonesia diwujudkan dengan mendirikan Tentara Pembela Tanah Air (Peta). Dalam pengumuman mengenai pembentukan Peta dinyatakan bahwa seluruh anggotanya terdiri dari bangsa Indonesia sendiri. Pasukan-pasukan Peta dibentuk di setiap Syu (karesidenan) yang bertugas untuk mengamankan dan mempertahankan daerah masing-masing. Penyebarluasan berita tentang pembentukan Peta dan syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota Peta ternyata mendapat perhatian besar dari masyarakat, khususnya di Jawa. Hal ini disebabkan oleh persyaratan anggota Peta tidak terlalu mementingkan tingkat pendidikan seperti pada *Heiho*, tetapi lebih mengutamakan manajemen kepemimpinan. Mengenai persyaratan umur hanya disebutkan untuk calon komandan peleton berusia di bawah 30 tahun, sedangkan untuk calon komandan regu dan prajurit harus di bawah 25 tahun (Anderson, 1972 : 14). Sekali pun demikian mereka yang diterima menjadi komandan batalyon ternyata terdiri dari para tokoh seperti guru dan kyai yang telah mempunyai pengaruh kuat atau sebagai "*agent of change*" dalam masyarakat. Para calon perwira di Peta dibagi dalam tiga kelompok, yaitu *Daidanco* (calon komandan batalyon), *Gudanco* (calon komandan kompi), dan *Syudanco* (calon komandan peleton). Para calon perwira sudah menjalani latihan militer di Bogor sejak mulai akhir 1943 hingga pertengahan 1944.

Peta mempunyai kewajiban menyiapkan dan menghimpun tenaga kawula muda apabila Sekutu mendarat di Indonesia. Oleh karena itu, semuanya dilakukan serba cepat sebab situasi perang memang sudah begitu

mengkhawatirkan Jepang. Bagi Jepang sendiri tidak begitu penting, apakah para perwira-perwira baru itu sudah terampil atau belum di bidang kemiliteran, sebab keberadaan mereka tetap di bawah derajat tentara Jepang sendiri (Sihombing, 1962 : 168). Perlakuan-perlakuan tentara Jepang terhadap para perwira putra Indonesia seringkali menyebabkan tekanan psikologis. Bahkan berawal dari masalah-masalah psikologis di kalangan perwira Peta seperti inilah yang menjadi salah satu sebab meletusnya pemberontakan Peta di Blitar pada tanggal 14 Pebruari 1945. Pemberontakan Peta Blitar ini segera dapat dipadamkan oleh tentara Jepara dan tokoh pemberontakan sebagian dihukum mati atau dihukum penjara. Apapun akibat-akibat dari suatu gerakan, ternyata pemberontakan Peta di Blitar merupakan manifestasi perasaan dan kebersamaan pemuda Indonesiayang selalu ingin melepaskan diri dari kekejaman dan belenggu pasukan Jepang. Pada waktu Jepang menyerah kalah kepada Sekutu tahun 1945, para perwira tersebut keluar dari tentara Peta. Atas dasar pertimbangan rasional seperti ini tidaklah terlalu berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa tentara Peta bukanlah pemuda Tentara Nasional Indonesia (TNI), sekalipun tidak jarang anggota tentara Peta yang menjadi tokoh utama TNI di kemudian hari.

2.2. Gerakan Sosial Politik

Kekalahan pasukan Jepang di berbagai medan tempur menyebabkan semakin menipisnya kepercayaan bangsa Indonesia terhadap kemampuan pemerintah Jepang. Untuk itu Jepang bertekad memulihkan kepercayaan di kalangan bangsa Indonesia terhadap kemampuan pasukan Jepang. Jepang mulai mengadakan pendekatan dengan para tokoh nasionalis Indonesia. Pemerintah Jepang mulai mengubah kebijakannya, yaitu merangkul barisan nasionalis-nasionalis muda Indonesia untuk memperoleh kemenangan di medan tempur perang Asia Timur Raya dengan membentuk sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipelopori oleh "empat serangkai" terdiri dari Sukarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan Haji Mas Mansyur. Pada awalnya Putera digunakan sebagai alat penggerak

pemuda Indonesia dengan maksud untuk membujuk kalangan muda supaya memiliki kepedulian terhadap pemerintah Jepang. Sementara itu, kehadiran Sukarno dan Moh. Hatta dalam wadah Putera ternyata ambivalen. Di satu sisi mereka bekerja untuk kepentingan Jepang, tetapi di sisi lainnya mereka harus merealisasikan cita-cita nasionalisnya yakni mengembangkan nasionalisme Indonesia ke arah kemerdekaan bangsanya. Untuk itu kekuatan nasional harus tetap diperkuat dan dikumandangkan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan nasionalis dari gerakan atau organisasi illegal/bawah tanah. Keberadaan organisasi bawah tanah tidak dapat dipisahkan dengan adanya asrama-asrama pemuda sebagai pusat pergerakan mereka.

Asrama dapat dipandang sebagai tempat persemaian yang efektif bagi pemuda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka membentuk gerakan pemuda dalam bentuk kelompok-kelompok seperti kelompok asrama Mahasiswa Prapatan 10, kelompok asrama Mahasiswa Angkatan Baru Indonesia, kelompok Sjahrir, kelompok asrama Mahasiswa Indonesia. Di luar kelompok-kelompok asrama itu juga terdapat organisasi-organisasi pemuda/mahasiswa non-asrama seperti yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin.

Kelompok pemuda/mahasiswa di Jakarta yang aktif melakukan gerakan dipusatkan di dua asrama, yaitu asrama mahasiswa Ika Daigaku (di jalan Prapatan 10) dan kelompok di jl. Cikini Raya yang pada waktu mereka bergabung dalam Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia (BAPERPI). Sebagai mahasiswa mereka belum mempunyai politik jangka panjang, sebab pertumbuhan dan dinamika gerakan mereka lebih banyak diwarnai oleh idealisme pemuda. Sikap dan perilaku inilah yang kemudian melahirkan mereka sering berbenturan dengan pemerintah Jepang.

Ketika tokoh pemuda/mahasiswa yang menonjol pada waktu itu adalah Sukarno, Moh. Hatta, dan Sjahrir yang secara strategis mereka memiliki target pergerakan yang sama yakni mencapai kemerdekaan Indonesia. Hanya secara terpisah mereka mampu memanfaatkan bantuan dan fasilitas pemerintah Jepang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ketika sedang memuncaknya pembentukan organisasi militer dan semi-militer oleh Jepang (*Keibondan*, *Seinendan*, *Heiho*, dan *Peta*), diantara mereka berhasil mendirikan sel-

sel/cabang-cabang organisasi pemuda/mahasiswa di wilayah Jawa seperti Surabaya, Cepu, Cirebon, Garut, dan Semarang. Salah satu kegiatan cabang-cabang ini adalah mendengarkan radio Sekutu secara diam-diam, kemudian menyebarkan beritanya keseluruh cabang pergerakan pemuda. Stasiun radio yang menjadi sumber berita adalah radio Australia dan BBC London. Melalui berita radio itulah para pemuda dapat memantau dan mengetahui setiap kekalahan dan kemajuan yang dialami tentara Jepang di berbagai front. Dari sumber berita itulah gerakan pemuda mampu memprediksi keadaan dan mengalsis kemungkinan kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah Jepang di Indonesia

2.3. Awal Kekalahan Jepang

Pada pertengahan tahun 1945 posisi Jepang dalam Perang Dunia II sudah sangat sempit. Beberapa daerah pendudukan Jepang di wilayah Asia Pasifik dapat direbut oleh Sekutu. Kemudian setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Keadaan ini segera dimanfaatkan oleh golongan tua dan golongan pemuda untuk segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan.

Pada Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dibom oleh Amerika, akibat tekanan yang hebat melanda Jepang, pada tanggal 14 Agustus 1945 pemerintah Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita penyerahan Jepang ini dedengar oleh Syahrir dari siaran radio Amarika, kemudian Syahrir menyampaikan kepada Drs. Moh. Hatta dan diteruskan kepada Ir. Soekarno. Untuk meyakinkan berita tersebut Drs. Moh. Hatta dan Ir. Soekarno mendatangi rumah Laksamana Maeda, Berdasarkan jawaban Laksamana Maeda, Drs. Moh. Hatta dan Ir. Soekarno bertambah yakin bahwa perang sudah berakhir.

Dengan kekalahan Jepang terhadap Sekutu berarti tiba saatnya untuk segera mewujudkan cita-cita dan tekad bangsa Indonesia mencapai tujuan perjuangan untuk mencapai kemerdekaannya. Tokoh-tokoh perjuangan berpendapat bahwa Indonesia berada dalam keadaan Vacuum of Power. Keadaan itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pejuang di Jakarta untuk

mewujudkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Menentukan siapa dan bagaimana proklamasi dilaksanakan
- b) Menyusun teks proklamasi
- c) Menentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi
- d) Menentukan bentuk pelaksanaan proklamasi yang tepat
- e) Menentukan cara menyebarluaskan berita proklamasi
- f) Menentukan langkah-langkah yang diambil setelah proklamasi dikumandangkan
- g) Mempersiapkan perlengkapan negara

2.4. Pertentangan antara Golongan Tua dan Golongan Muda

Pertentangan antara golongan tua dan muda terjadi jauh sebelum mendekati proklamasi yaitu saat Soekarno menjabat sebagai ketua Jawa Hookokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Bertempat di gedung Hookokai depan Lapangan Banteng tanggal 8 Juni 1945 Soekarno didatangi para pemuda yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ketika itu masa-masa sidang kedua BPUPKI dan tuntutan para pemuda adalah agar kemerdekaan benar-benar diperjuangkan dan segera diproklamasikan. Menurut para pemuda kemerdekaan Indonesia tidak perlu menunggu perintah dari Jepang.

Para pemuda pemberani dan revolusioner tersebut adalah anggota Gerakan Angkatan Baru yang di ketuai oleh BM>Diah. Mereka berusaha menjelaskan kepada Soekarno bahwa mereka mengikuti setiap berita yang dilaporkan melalui radio-radio luar negeri. Berdasarkan berita yang mereka dengar, dikabarkan bahwa kekuatan Jepang di perang telah terdesak oleh sekutu. Diperkirakan tidak lama lagi Jepang akan lumpuh. Namun pernyataan dan berita menggembirakan itu tidak dapat meyakinkan Soekarno, karena Soekarno tetap bersikukuh pada keputusan panitia untuk melanjutkan sidang BPUPKI.

Mendengar penolakan Soekarno, para pemuda dari Gerakan Angkatan Baru menjadi semakin kecewa setelah sebelumnya juga meminta dukungan Hatta namun ditolak. Penolakan tersebut mereka anggap bahwa Soekarno dan

Hatta bukan pejuang revolusioner. Namun para pemuda tidak menyerah begitu saja, mereka terus-menerus mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sampai kemudian para pemuda berada pada titik kulminasi kekecewaan terhadap para golongan tua, sehingga mencetuskan pengungsian Soekarno Hatta ke luar kota Jakarta yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Rengasdengklok. Ketika itu masa-masa sidang kedua BPUPKI dan tuntutan para pemuda adalah agar kemerdekaan benar-benar diperjuangkan dan segera diproklamasikan. Menurut para pemuda kemerdekaan Indonesia tidak perlu menunggu perintah dari Jepang.

Dibawah ini adalah beberapa anggota Golongan Muda dan Golongan Tua, yaitu :

2.3.1. Golongan Muda

Golongan Muda usianya rata-rata 25 Tahun (Alumni Mahasiswa dan Anggota PETA). Mereka adalah :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Chirul Saleh | 18) Djohar Noer |
| 2) Sukarni | 19) S.K. Wijoto |
| 3) Dipa Nusantara Aidit | 20) Ridwan Bazar |
| 4) Lukman | 21) Kusnandar |
| 5) Adam Malik | 22) Subadio |
| 6) B.M. Diah | 23) Margono |
| 7) Anwar | 24) Alamsyah |
| 8) Harsono Tjokroaminoto | 25) Abubakar Lubis |
| 9) Darwis | 26) Suhud |
| 10) Sudanco Supriadi | 27) S.K Trimurti |
| 11) Sutan Syahrir | 28) Sumanang |
| 12) Abdul Latif Hendraningrat | 29) Ilyas Karim |
| 13) Shudanco Singgih | |
| 14) Wikana | |
| 15) A.M. Hanafi | |
| 16) Pardjono | |
| 17) Pandu Kartawiguna | |

2.3.2. Golongan Tua

Golongan tua usianya diatas 50 Tahun (Sebagian besar anggota PPKI) . Mereka adalah :

- 1) Ir. Soekarno
- 2) Drs. Moh. Hatta
- 3) Mr. Moh. Yamin
- 4) Dr. Buntaran
- 5) Dr. Syamsi
- 6) Mr. Iwa Kusumasumantri
- 7) Anang Abdul Hamidan
- 8) Andi Pangeran Pettarani
- 9) Bandoro Pengeran Hario Purubojo
- 10) Bandoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo
- 11) Dr.G.S.S.J Ratulangie
- 12) Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat
- 13) Dr.M. Amir
- 14) Hj. Abdul Wahid Hasyim
- 15) Hj. Teuku Moh. Hasan
- 16) Mas Sutarjo Kartohadikusumo
- 17) Mr. Abdul Abbas
- 18) Mr. I Gusti Ketut Puja
- 19) Mr. Raden Ahmad Subarjo
- 20) Mr. Raden Kasman Singodimejo
- 21) Mr. Yohanes
- 22) Muh. Ibnu Sayuti Melik
- 23) Prof. Dr. Mr. Raden Supomo
- 24) Raden Abdul Kadir
- 25) Raden Adipati Wiranatakusuma
- 26) Raden Oto Iskandardinata
- 27) Raden Panji Suroso

2.5. Gerakan Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok ini dilaterbelakangi oleh perdebatan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua tetap pada pendiriannya dengan Terauci, yakni setelah rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan golongan muda menghendaki secepatnya paling lambat tanggal 16 Agustus 1945 di luar kerangka PPKI. Golongan tua tidak ingin terburu-buru, mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun di lakukan dalam rapat PPKI. Namun, golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menyingkakan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Kejadian ini mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno dan Moh.Hatta keluar kota, yaitu ke Rengasdengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Rengasdengklok adalah sebuah kecamatan di kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Sehingga peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa dari pengasingan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda seperti Shodanco Singgih, Adam Malik dan Chaerul Saleh terhadap para pemimpin bangsa yaitu Bung Karno yang di temani Fatmawati dan Guntur serta Bung Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan di Rengasdengklok, untuk kemudian didesak agar mempercepat Proklamasi.

Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut.

Proklamasi kemerdekaan republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis, 16 Agustus 1945 di

Rengasdengklok, di rumah Djiaw Kie Siong. Naskah teks proklamasi sudah ditulis di rumah itu.

Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui MR. Ahmad Soebardjo. Pada akhirnya Jusuf Kunto dan Ahmad Soebardjo sepakat bahwa proklamasi akan diadakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang selambat-lambatnya dibacakan pukul 12 siang. Kemudian Ahmad Soebardjo beserta Jusuf Kunto ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Ahmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56, pada tanggal 16 Agustus 1945 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta.

Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta didasarkan pada dua pertimbangan yaitu militer, anata anggota PETA Daidan, Purwakarta dan Daidn Jakarta terdapat hubungan yang erat sejak mengadakan latihan bersama. Kedua pertimbangan geografis Rengasdengklok letaknya terpencil, dengan demikian akan dapat dengan mudah melakukan deteksi terhadap setiap gerakan Jepang yang akan datang ke Rengasdengklok.

3.1. Kesimpulan

Pernyataan merdeka dari bangsa Indonesia juga mempunyai arti sejak saat bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian berarti bahwa bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah menandai berdirinya sebuah negara baru dan dengan negara berdirinya negara baru ini konsekuensinya harus memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara

Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa kekejaman dan penderitaan bangsa Indonesia hanya "*seumur jagung*" ternyata cukup populer sebagai penangkal penderitaan dan menyongsong datangnya zaman baru yang "*gemah ripah loh jinawi*". Makna di balik ramalan inilah yang semakin memperkuat kerjasama di kalangan pemuda. Bahkan puncak perjuangan menuju kemerdekaan merupakan hasil kerjasama antara kelompok tua dengan kelompok muda. Perhitungan politik yang tajam yang dikombinasikan dengan prosedur gerakan pemuda yang dikembangkan dengan nilai kebersamaan, pada akhirnya perjuangan pemuda mampu menghantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

MODUL IV

SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya dengan pengucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia adalah Negara yang baru lahir sehingga masih rentan dengan penjajahan bangsa asing maupun pemberontakan bangsa sendiri. Agar kemerdekaan bangsa Indonesia bisa bertahan, maka diperlukan suatu pemerintahan yang kokoh yang mencerminkan jiwa, kepribadian bangsa Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Demikian bunyi alinea pertama Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pernyataan itu merupakan reaksi terhadap kenyataan bahwa selama berabad-abad bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing, yang terakhir adalah pendudukan tentara Jepang. Selama berabad-abad itu pula bangsa Indonesia melakukan perlawanan dan perjuangan yang gigih tiada hentinya, untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka dengan proklamasi kemerdekaan yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuklah Negara Indonesia. Metamorfosis bentuk pemerintahan sejak Indonesia merdeka telah mencapai paripurna yang ditetapkan bentuk Negara dan sistem pemerintahan Indonesia. Mengacu pada UUD 1945, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Hal ini sebagaimana tertera dalam UUD 1945 pasal I ayat 1 dan 2.

B. Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia



Pada tahun 1944 Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik, sehingga untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang ini. Maka Perdana Menteri Jepang, Koiso memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk merealisasikan janji tersebut, Maka di bentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepangnya Dokoritzu Djunbi Coosakai. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Perang, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk, sementara anggotanya di lantik pada tanggal 28 Mei 1945, dengan struktur keanggotaan Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Soeroso dan Ichi Bangase sebagai wakil. Jumlah anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang, lalu bertambah lagi 6 orang sehingga jumlah keseluruhan anggotanya adalah 66 orang.

Ketua: Dr. Radjiman Wedyodningrat

Wakil: ichibangase dan Soeroso

Sekretaris: A.G Pringgodigdo

Anggota : 60 orang dan bertambah 6 orang

1. Tugas BPUPKI : untuk menyelidiki dan merencanakan pemerintah Indonesia yang akan menerima kemerdekaan dari Jepang dan menyusun rancangan UUD.
2. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali.
sidang pertama: (29 Mei 1945-1 Juni 1945)

Hasil sidang pertama

konsep dasar Negara atau yang biasa kita sebut sebagai Pancasila.

Dalam sidang ini ada 3 tokoh yang menyampaikan konsep dasar Negara (Pancasila), yaitu :

Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

1. Dengan bunyi konsep Dasar Negara: Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Mr. Supomo (31 Mei 1945) Dengan bunyi konsep Dasar Negara :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan bathin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Ir. Soekarno (1 Juni 1945) Dengan bunyi konsep Dasar Negara :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebelum sidang BPUPKI yang pertama selesai, terjadi masa Reses (istirahat). Pada masa Reses ini terbentuklah Panitia Sembilan yang bertugas untuk membahas kembali Konsep Dasar Negara yg di rumuskan pada saat sidang Pertama BPUPKI untuk mencapai kesepakatan yang menjadi Dasar Negara bagi Negara Indonesia.

Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia Sembilan mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda untuk membahas usul – usul mengenai asas dasar yang telah dikemukakan pada saat sidang pertama BPUPKI.

Kesembilan anggota Panitia Sembilan adalah :

1. Ir. Sukarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil)
3. Mr. A.A Maramis
4. Abikoesno Tjokrosoejoso
5. Abdul Kahar Muadzakir
6. Hadji Agoes Salim
7. Mr. Achmad Soebardjo
8. K.H Wachid Hasyim
9. Mr. Muhammad Yamin

Hasil kerja panitia Sembilan di sebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Yaitu :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang kedua BPUPKI (10 – 17 Juli 1945):

Hasil dari sidang kedua ini adalah rancangan UUD 1945. Selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perang UUD dengan suara bulat menyetujui isi Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia Perancang UUD kemudian membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo. Tugas panitia kecil perancang UUD adalah menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati. Dalam kesempatan itu, dibentuk pula “Panitia Penghalus Bahasa” yang terdiri atas Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, Prof. Dr. Soepomo dan H. Agoes Salim.

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah selesai menyelesaikan tugasnya, dan digantikan dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang, Dokoritzu Djunbi Inkai. PPKI dibentuk atas usulan Jendral Terauchi. Keanggotaannya dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dallah, Vietnam Selatan oleh Jendral Terauchi, dengan Ir. Sukarno sebagai Ketua, Drs. Moh. Hatta sebagai wakil. Anggota PPKI awalnya berjumlah 21 orang, lalu, bertambah 6 orang sehingga jumlah akhir anggota PPKI sebanyak 27 orang

Dibentuk: 7 Agustus 1945 atas usulan Jendral Terauchi.
keanggotaan dilantik: 9 Agustus 1945 di Dallah, Vietnam Selatan oleh jendral Terauchi

Ketua: Ir. Sukarno

Wakil: Drs. Moh Hatta

Anggota: 21 orang bertambah 6 orang.

Tugas PPKI :

Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan menetapkan UUD 1945. PPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Menetapkan UUD 1945

Memilih Ir. Sukarno sebagai presiden dan Mr. Moh Hatta sebagai wakil presiden. Untuk sementara tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional sebelum terbentuknya MPR. Pada sidang ini, dilakukan pengesahan dasar Negara yang sebelumnya dirumuskan oleh Panitia Sembilan. Pengesahan ini dilakukan dengan mencoret/mengganti bunyi sila pertama “ Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya” menjadi “ Ketuhana yang maha esa”

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang keduanya yang menghasilkan dua buah keputusan, yaitu :

Menetapkan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan yaitu, Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Membagi daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan pada akhirnya, PPKI mengadakan sidangnya yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 dan berhasil mengambil keputusan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah, Partai Nasional Indonesia, serta Badan Keamanan Rakyat.

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang PPKI

Pada sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan dua perubahan.

Pertama, berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kedua, Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam" diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli". Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45–48. Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut.

PANCASILA
<ol style="list-style-type: none">1. Ketuhanan Yang Maha Esa.2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.3. Persatuan Indonesia.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
2. Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai saat itu bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Peristiwa Sekitar Proklamasi Sampai Terbentuknya NKRI

Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk bebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Sejak saat itu Indonesia berdaulat sebagai negara merdeka dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



1. Kekalahan Jepang Dan Kekosongan Kekuasaan

Perang Dunia II terjadi setelah Jepang membombardir Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. Hancurnya Pearl Harbour, ternyata memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk persekemukmuran Asia Timur Raya. Daerah-daerah di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang. Pembentukan Persekemukmuran Asia Timur Raya berhasil diwujudkan, meskipun hanya untuk sementara. Serangan Jepang ke Indonesia (Hindia Belanda) pertama-tama terjadi 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Balikpapan yang merupakan daerah yang kaya akan minyak bumi, jatuh ketangan Jepang 24 Januari 1942, disusul kemudian Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Pebruari 1942, Banjarmasin 10 Pebruari 1942. Dalam perkembangannya, Jepang mulai mengalami kesulitan, terutama setelah Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya dari Eropa. Pada bulan Mei 1942, serangan Jepang terhadap Australia dapat dihentikan karena tentara

Jepang menderita kekalahan dalam pertempuran Laut Koral (Karang). Serangan Jepang terhadap Hawaii juga dapat digagalkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu, dengan ditanda tangannya perjanjian Post Dam, maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan pada Sekutu. Dengan demikian di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan.

Untuk mengakhiri peperangan ini, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di atas kota Hiroshima. Tiga hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan lagi di atas Nagasaki. Akibatnya bukan saja membawa kerugian material, karena hancurnya kedua kota tersebut dan banyaknya penduduk yang menemui ajalnya. Tetapi secara politis telah mempersulit kedudukan Kaisar Hirohito, karena harus dapat menghentikan peperangan secepatnya guna menghindari adanya korban yang lebih banyak lagi. Hal ini berarti bahwa Jepang harus secepatnya menyerah kepada Sekutu atau Serikat. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

2. Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Karena terjadi kekalahan Jepang terhadap Sekutu dalam beberapa pertempuran seperti yang disebutkan diatas, maka Jepang mulai ngobral janji. Janji itu dikenal dengan janji kemereekaan. Bila bangsa Indonesia mau membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu, maka kelak kemudian hari akan diberikan kemerdekaan. Untuk mengawalinya dibentuklah Badan yang bertugas menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kemerdekaan yang dijanjikan. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI yang dlam perkembangannya berubah menjadi PPKI. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat (unconditional surrender). Hal ini diumumkan oleh Tenno Heika melalui radio. Kejadian itu jelas mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan janji atau usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia. Soal terus atau tidaknya usaha mengenai kemerdekaan Indonesia tergantung sepenuhnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia. Sementara itu Sutan Sjahrir sebagai seorang yang mewakili pemuda merasa gelisah karena telah mendengar melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan memutuskan untuk menyerah pada Sekutu. Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Sukarno-Hatta tanpa harus menunggu janji Jepang. Itulah sebabnya ketika mendengar kepulangan Sukarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat dari Dalat (Saigon), maka ia segera datang ke rumah Hatta dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tanpa harus menunggu dari pemerintahan Jepang. Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sjahrir maka diajaknya ke rumah Sukarno. Namun Sukarno belum dapat menerima maksud Sjahrir dengan alasan bahwa Sukarno hanya bersedia melaksanakan proklamasi, jika telah diadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI lain. Dengan demikian tidak menyimpang dari rencana sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintah Jepang. Selain itu Sukarno akan mencoba dulu untuk mengecek kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut.

3. Peristiwa Rengasdengklok

Sikap Sukarno dan Hatta tersebut memang cukup beralasan karena jika proklamasi dilaksanakan di luar PPKI, maka Negara Indonesia Merdeka ini harus dipertahankan pada Sekutu yang akan mendarat di Indonesia dan sekaligus tentara Jepang yang ingin menjaga status quo sebelum kedatangan Sekutu. Sjahrir kemudian pergi ke Menteng Raya (markas para pemuda) bertemu dengan para pemuda seperti: Sukarni, BM Diah, Sayuti Melik dan lain-lain. Kelompok muda menghendaki agar Sukarno-Hatta (golongan tua) segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan muda, tidak seharusnya para pejuang kemerdekaan Indonesia menunggu-nunggu berita resmi dari Pemerintah Pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia harus segera mengambil inisiatifnya sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaan. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30. Hadir antara lain Chaerul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Rapat itu dipimpin oleh Chaerul Saleh dengan menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri. Yang mendapat kepercayaan dari teman-temannya untuk menemui Sukarno adalah Wikana dan Darwis.



Gambar 9.2 Sukarni
Sumber: SNI Jilid VI



Gambar 9.3 Chaerul Saleh
Sumber: SNI Jilid VI

Oleh Wikana dan Darwis, hasil keputusan itu disampaikan kepada Sukarno jam 22.30 di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur, No 56 Jakarta. Namun sampai saat itu Sukarno belum bersedia memproklamasikan kemerdekaan

Indonesia tanpa PPKI. Di sini terjadi perdebatan sengit antara Sukarno dengan Wikana dan Darwis. Dalam perdebatan itu Wikana menuntut agar proklamasi dikumandangkan oleh Sukarno pada keesokan harinya.



Gambar 9.4 Wikana
Sumber: SNI Jilid VI

Sukarni, Chairul Saleh, Wikana, Sayuti Melik adalah tokoh-tokoh muda yang mendesak Sukarno-Hatta untuk segera memproklamsikan kemerdekaan

Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok tua dengan kelompok muda yang memiliki sifat, karakter, cara bergerak, dan dunianya sendiri-sendiri. Perbedaan pendapat itu tidak hanya berhenti pada adu argumentasi, tetapi sudah mengarah pada tindakan pemaksaan dari golongan muda. Tentu saja semua itu demi kemerdekaan Indonesia.



Gambar 9.5 Laks. Maeda
Sumber: SNI Jilid VI



Gambar 9.6 Sayuti Melik
Sumber: SNI Jilid VI

Para pemuda itu kembali mengadakan pertemuan dan membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Chaerul Saleh yang tetap pada pendiriannya bahwa kemerdekaan harus tetap diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti yang direncanakan oleh Jepang. Orang yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan itu adalah Soekarno-Hatta. Karena mereka menolak usul pemuda itu, pemuda memutuskan untuk membawa mereka ke luar kota yaitu Rengasdengklok, letaknya yang terpencil yakni 15

km ke arah jalan raya Jakarta-Cirebon. Menurut jalan pemikiran pemuda jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamkan kemerdekaan ini dilakukan.

Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengaman Soekarno-Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota Peta Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil. Dengan demikian akan dapat dilakukan deteksi dengan mudah terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik yang datang dari arah Jakarta, maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah. Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang, juga agar keduanya mau segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Pada dasarnya Soekarno dan Hatta tidak mau ditekan oleh anak-anak muda itu, sehingga mereka tidak mau memproklamkan kemerdekaan. Dalam suatu pembicaraan dengan Shodanco Singgih, Soekarno memang menyatakan kesediannya untuk mengadakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Melihat sikap Soekarno ini, maka para pemuda berdasarkan rapatnya yang terakhir pada pukul 00.30 waktu Jawa jaman Jepang (24.00 WIB) tanggal 16 Agustus 1945 terdapat keputusan akan mengadakan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta dalam rangka upaya pengaman supaya tidak terpengaruh dari segala siasat Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 (waktu Jepang) atau pukul 04.00 WIB penculikan (menurut golongan tua) dilaksanakan. Tidak diketahui secara jelas siapakah yang memulai peristiwa ini. Ada yang mengatakan Sukarni-lah yang membawa Soekarno-Hatta dini hari ke Rengasdengklok. Menurut Soekarno Sjahrir-lah yang menjadi pemimpin penculikan dirinya dengan Hoh. Hatta. Walaupun sudah diamankan ke Rengasdengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno-Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan oleh pemuda serta berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Seorang utusan pemuda yang bernama Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk

melaporkan sikap Soekarno-Hatta dan sekaligus untuk mengetahui persiapan perebutan kekuasaan yang dipersiapkan pemuda di Jakarta.

Achmad Subardjo datang ke Rengasdengklok dan berhasil menyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua, yakni Achmad Soebardjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Laksamana Muda Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda dan Soebardjo yang diikuti oleh sekretaris pribadinya mbah Diro (Sudiro) menuju Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno. Semua ini dilakukan tidak lepas dari rasa prihatin sebagai orang Indonesia, sehingga terpanggil untuk menghusahkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan secepat mungkin.

Namun sebelumnya perlu mempertemukan perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Untuk itu maka Soekarno dan Hoh. Hatta harus terlebih dahulu kembali dari Rengasdengklok ke Jakarta. Rombongan yang terdiri dari Achmad Soebardjo, Sudiro dan Yusuf Kunto segera berangkat menuju Rengasdengklok, tempat dimana Soekarno dan Moh.Hatta diamankan oleh pemuda. Rombongan tiba di Rengasdengklok pada jam 19.30 (waktu Tokyo) atau 18.00 (waktu Jawa Jepang) atau pukul 17.30 WIB dan bermaksud untuk menjemput dan segeramembawa Soekarno-Hatta pulang ke Jakarta. Perlu ditambahkan juga, disamping Soekarno dan Hatta ikut serta pula Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Peranan Achmad Subardjo sangat penting dalam peristiwa ini, karena mampu mempercayakan para pemuda, bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00 WIB. Ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Akhirnya Subeno komandan kompi Peta setempat bersedia melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Achmad Subardjo adalah seorang yang dekat dengan golongan tua maupun muda, bahkan dia juga sebagai penghubung dengan pemuka angkatan laut Jepang Laksamana Madya Maeda. Dan melalui dia, Maeda menawarkan rumahnya

sebagai tempat yang amandan terlindung untuk menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik yang sudah lama ditunggu-tunggu.

4. Penyusunan Teks Proklamasi

Bertitik tolak dari keadaan yang demikian, kedudukan Maeda baik secara resmi maupun pribadi menjadi sangat penting. Dan justru dalam saat-saat yang genting itu, Maeda telah menunjukkan kebesaran moralnya. Berdasarkan keyakinan bahwa kemerdekaan merupakan aspirasi alamiah dan yang tidak terhindarkan dukungannya kepada tujuan kebebasan Indonesia. Di tempat kediaman Maeda Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta teks proklamasi ditulis. Kalimat yang pertama yang berbunyi “Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami” kemudian berubah menjadi “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” berasal dari Achmad Subardjo. Kalimat kedua oleh Soekarno yang berbunyi “Halhal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Kedua kalimat ini kemudian digabung dan disempurnakan oleh Moh. Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Sekarang timbul masalah siapakah yang akan menandatangani naskah proklamasi. Soekarno menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku “Wakil-wakil Bangsa Indonesia”. Saran itu mendapat tantangan dari para pemuda. Kemudian Sukarni selaku salah seorang pimpinan pemuda mengusulkan, agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Usul ini diterima dengan suara bulat. Selanjutnya Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah tulisan tangan tersebut.

5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sebelum teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan, terlebih dahulu Soekarno menyampaikan pidatonya, lengkapnya sebagai berikut:

Saudara-saudara sekalian!

Saja sudah minta saudara-saudara hadir disini untuk menjaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun ! Gelombangnja aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya, tetapi djiwa kita tetap menudju kearah tjita-tjita.

Djuga di dalam djaman Djepang, usaha kita untuk mentjapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Didalam djaman Djepang ini, tampaknja sadja kita menjandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnja kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnja. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarat dengan pemuka-pemuka rakjat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusjawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menjatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami:

Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah yaitu kata tempoh diganti menjadi tempo, sedangkan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan Atas nama Bangsa Indonesia dan Djakarta 17-8-05 menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05.

Teks Proklamasi ini akhirnya diproklamirkan pada hari Jumat Legi pada pukul 10.00 WIB di Jalan pegangsaan Timur No.56 Jakarta. Dalam peristiwa proklamasi itu, disusunlah acara sebagai berikut:

Pembacaan Proklamasi. Disampaikan oleh Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat berbunyi: *Demikianlah, saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah-air kita bangsa*

kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, medeka kekal dan abadi. Insya allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu! Pengibaran bendera Merah Putih.

Pengibaran dilaksanakan oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat. Namun secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang pengibaran bendera Merah Putih dalam setiap upacara bendera selalu diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Sambutan Wali Kota Suwirjo dan dr. Muwardi. Peristiwa besar tersebut hanya berlangsung lebih kurang satu jam lamanya. Namun demikian pengaruhnya besar sekali, sebab peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya sebagai tanda bahwa sejak itu bangsa Indonesia telah merdeka, tetapi di sisi lain juga merupan detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan bagi tertib hukum nasional, suatu tertib hukum Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta untuk ikut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadi, bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa lain.

6. Makna Proklamasi

Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalam teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberi tahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar, bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu, demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah proklamasi yang berbunyi: *“Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”*. Apabila ditelaah, maka proklamasi kemerdekaan itu mengandung beberapa aspek:

Dari sudut Ilmu Hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional (Indonesia).

Dari sudut politik-ideologis, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh.

Proklamasi Kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan dan kebahagiaan rakyat. Proklamasi sebagai dasar untuk meruntuhkan segala hal yang mendukung kolonialisme, imperialisme dan selain itu proklamasi adalah dasar untuk membangun segala hal yang berhubungan langsung dengan kemerdekaan nasional. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan rakyat tersebut telah mengorbankan harta benda, darah dan jiwa yang berlangsung sudah sejak berabad-abad lamanya untuk membangun persatuan dan kesatuan serta merebut kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bertujuan untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Agar kita bahagia, antara lain harus ada kesamaan diantara kita semua meliputi berbagai bidang misalnya bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sastra kebudayaan, pendidikan dan lain-lain. Dengan berhasil diproklamirkannya kemerdekaan, maka bangsa dan negara Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara *de facto* maupun secara *de jure*.

7. Dukungan Daerah Terhadap Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan telah dibentuk negara Republik Indonesia. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh PPKI dalam rangka untuk menyempurnakan Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang sah yaitu:

Pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga legislatifnya.

Kedua, tanggal 19 Agustus 1945

1. Pembagian wilayah Indonesia menjadi, terdiri atas 8 propinsi yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatra.
2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia di daerah.
3. Membentuk 13 kementerian yaitu; Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pekerjaan Umum.

Ketiga, tanggal 22 Agustus 1945

1. Pembentukan Komite Nasional.
2. Pembentukan Partai nasional Indonesia, dan
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

Kemerdekaan yang diproklamlirkan tersebut ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari daerah-daerah. Respon penting yang perlu mendapat perhatian adalah dari Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan Negeri Ngayogyakarta Hadidingrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Penyambutan kemerdekaan terus terjadi, pada tanggal 19 September 1945 terjadi dua peristiwa penting di tanah air secara bersamaan. Di Surabaya terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Insiden Bendera di Hotel Oranye yaitu perobekan bendera tiga warna (merah, putih, dan biru) milik Belanda menjadi dua warna (merah putih). Di Jakarta terjadi rapat raksasa di Lapangan IKADA (Ikatan Atletik Djakarta) untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, maka Presiden Soekarno berkata:

”Percayalah rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kalau memang saudara-saudara percaya kepada pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, kami tetap akan mempertahankan. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin”.

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pagi semua pegawai instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan kantor mereka kepada orang Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari makalai ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia harus menunggu lama. Diantara usahanya adalah dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Selain itu ada pula peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan indonesia diantaranya:

1. Kekalahan jepang dan kekosongan kekuasaan
2. Persiapan kemerdekaan indonesia
3. Peristiwa rengasdengklok
4. Penyusunan proklamasi
5. Proklamasi kemerdekaan indonesia
6. Makna Proklamasi, dan
7. Dukungan daerah terhadap pembentukan negara dan pemerintahan republic indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistence 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

MODUL V

PEMUDA DAN KONFLIK POLITIK

A. Pengertian Pemuda

Pemuda diidentikkan dengan kaum muda yang merupakan generasi bangsa, yang akan menentukan perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Sebagai seorang mahasiswa/mahasiswi kita adalah pemuda yang memiliki intelektual yang dapat berpikir demi perubahan dan kemajuan negara ini. Telah kita ketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. Hal ini merupakan pengertian ideologis dan kultural daripada pengertian ini. Di dalam masyarakat **pemuda** merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan

Princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus Webstersnya sebagai *“the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person”*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemuda adalah sebuah kehidupan yang berdiri direntang masa kanak-kanak dan masa dewasa dimasa inilah seorang pemuda bersifat labil, kontrol emosi dan kestabilan pendirian masih bisa dipengaruhi oleh pihak luar. Seorang pemuda mempunyai ciri yang khas yang menggambarkan seperti apa ia terlihat yang menunjukkan kepribadiannya.

Seorang pemuda harus bisa beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan disekitarnya. Maksudnya agar tumbuh sikap rasa peduli dan rasa kebersamaan didalam dirinya. Lihatlah di zaman sekarang teknologi yang berkembang telah disalahgunakan seolah-olah globalisasi telah memberi efek buruk pada generasi muda. Individualisme itulah yang terjadi pada pemuda zaman sikap peduli pada lingkungan sekitar menurun drastis. Contoh umum jika ada kerja bakti dilingkungan sekitar banyak pemuda yang bermalas-malasan untuk ikut serta

dalam kegiatan ini lebih memilih bermain dirumah atau memainkan android,iphone atau apalah itu . Pemuda seperti apa ini!

Dalam kehidupannya seorang pemuda dituntut dapat bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Proses sosialisasi pemuda didefinisikan proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri. Proses sosialisasi sebenarnya berawal dari dalam keluarga. Melalui proses sosialisasi, individu (pemuda) akan terwarna cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya dengan proses sosialisasi, individu menjadi tahu bagaimana ia mesti bertingkah laku ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya.Sesuai dengan pepatah lama semakin banyak dilihat semakin banyak dirasa. Jadi pengalaman adalah hal yang dibutuhkan seorang pemuda bisa bertindak dan mengasah pola pikirnya untuk perubahan yang akan datang.Pengalaman adalah hal yang sangat penting dalam menunjang kemajuan pola pikir seorang pemuda.Pemuda dituntut kreatif inovatif dan korporatif (kerjasama”dalam hal baik”). Semakin banyak ia bergaul dengan orang lain maka semakin banyak pengalaman yang ia peroleh. Ia dikenal banyak orang dan mendapat banyak sekali akses dari orang disekitarnya ditambah dengan etika dan kepribadiannya yang baik, siapapun pasti menyukai sosok pemuda seperti ini.

Kemudian kita bandingkan dengan pemuda yang bersifat individualisme, kikuk ditengah masyarakat,kaku dan tidak mampu mengaplikasikan manfaat dirinya akan terbuang ditengah kehidupan.Kondisi yang masih labil membuat pemuda sering hanyut dengan berbagai pergaulan untuk itu berhati-hatilah memilih teman bergaul.Diperlukan pertahanan yang kuat agar tidak terjerumus kedalam kegelapan akibat pergaulan bebas yang sangat membahayakan generasi muda. Banyak contoh-contoh menunjukkan pemuda atau generasi zaman sekarang rusak, mulai dari video porno SMA, Sex bebas SMP.Mau jadi apa generasi seperti ini.Bukannya memperbaiki kondisi bangsa sekarang malah menambah beban yang ada.Peran pemuda sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

Seorang pemuda dituntut dapat merubah keadaan kearah yang lebih baik bukannya memperburuk keadaan atau merusak tatanan yang telah ada. Calon-

calon pemimpin yang akan datang, tokoh masyarakat atau bahkan menjadi panutan untuk orang lain. Kilas balik sejarah bangsa kita Indonesia. Bukan fisik atau senjata menjadi tonggak awal kita merdeka tapi karena adanya inisiatif atau kesadaran para pemuda zaman perjuang waktu itu kita merdeka. Adanya sikap revolusioner dan motivasi diri maka pemuda saat itu bisa membawa negara kita mencapai kemerdekaan. Berdirinya Bung Tomo telah menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia. Ini artinya bahwa pemuda mampu menggapai apapun dan mampu membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Bung Tomo adalah organisasi perkumpulan pemuda yang pertama, lalu semangatnya telah memotivasi pemuda-pemuda lain sehingga terbentuklah organisasi pemuda-pemuda yang lain seperti Jong Java, Jong Sumatera, maupun Jong-Jong lainnya.

Dalam sebuah pidatonya, Soekarno pernah mengorbakan semangat juang Pemuda apa kata Sukarno “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kugoncangkan dunia”. Begitu besar peranan pemuda di mata Sukarno, jika ada sembilan pemuda lagi maka Indonesia menjadi negara Super Power.

Pemuda adalah sesuatu yang luar biasa, seperti yang telah dibicarakan sebelumnya walaupun emosi yang sangat labil tapi pemuda memiliki kelebihan-kelebihan yang menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik berupa perubahan sosial maupun kultural dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri Perubahan. Tetapi sering kali informasi yang diterima tidak melalui seleksi yang ketat sehingga seorang pemuda mudah terbawa arus dan pengaruh media massa yang ada.

Kesimpulannya adalah bahwa seorang pemuda harus memiliki jiwa dan sikap metal yang bisa membawa ia menciptakan sebuah iklim perubahan kearah yang lebih baik dan memiliki kemampuan sosialisasi ditengah kehidupan dimasyarakat agar ia mampu memecahkan sebuah polemik dan mampu beradaptasi dengan kehidupan sosialnya.

B. Pentingnya Peran Generasi Muda Sebagai Generasi Penerus Bangsa



Muda adalah seseorang yang secara fisik mengalami perkembangan secara psikis dan mengalami perkembangan secara emosional. Sehingga pemuda ialah sumber daya manusia jangka panjang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi saat ini. WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa seseorang yang dikatakan muda adalah bagi mereka yang berusia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut dengan "*adolesceneae*" atau remaja.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Definisi Pemuda adalah mereka yang berusia 18 hingga 35 Tahun. Usia muda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Selain itu, pemuda juga selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat pada umumnya. Dalam makna positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu yang kreatif dan inovatif.

C. Solusi Agar Generasi Muda Bangsa, Tidak Terjerumus Dalam Penyimpangan Sosial :

1. Mengajarkan pendidikan agama dengan baik dan maksimal terhadap remaja. Jika landasan agama yang dimiliki remaja sudah baik, otomatis remaja tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang, karena pada dasarnya penyimpangan sosial terjadi diakibatkan kurangnya pendidikan agama bagi anak remaja.
2. Memberikan pelajaran moral dan memberikan penjelasan tentang akibat yang akan dirasakan remaja jika remaja tersebut melakukan penyimpangan sosial.
3. Pihak pemerintahan bekerja sama kepada pihak swasta untuk bersama-sama membentuk suatu peraturan terkait dengan pengurangan jam kerja bagi wanita yang sedang hamil dan yang memiliki balita, tentu dalam hal ini peran orangtua terhadap anak sangat penting dalam perkembangan anak. Sejauh ini pemberlakuan pengurangan jam kerja bagi wanita hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, namun bagi wanita yang bekerja di perusahaan swasta belum memberlakukan pengurangan jam kerja dan terutama hak-hak wanita dalam bekerja pun belum di terapkan oleh perusahaan swasta meski dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan telah tercantum hak-hak bagi pekerja wanita.

D. Peranan Pemuda Dalam Kemajuan Bangsa (Sebelum Zaman Kemerdekaan)

Di era Reformasi, para pemuda khususnya mahasiswa selalu berperan dalam perubahan negeri ini. Berbagai peristiwa besar identik dengan peran pemuda dan mahasiswa didalamnya.

Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, gerakan pemuda dan mahasiswa sering menjadi tombak perjuangan nasional. Beberapa Gerakan pemuda dan Mahasiswa yang dicatat di dalam sejarah adalah sebagai berikut :

1. Budi Utomo
2. Sumpah Pemuda
3. Perhimpunan Indonesia
4. Peristiwa Rengasdengklok

Sejarah panjang gerakan pemuda dan mahasiswa merupakan salah satu bukti eksistensi dan tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia dalam memberikan perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

E. Peranan Pemuda Dalam Kemajuan Bangsa (Setelah Zaman Kemerdekaan)

Melihat dari uraian sejarah perjuangan para pemuda pada masa penjajahan, seharusnya kaum muda pada masa kini menjadi penerus dari pada perjuangan kaum muda dahulu. Jika kaum muda dahulu begitu gigih dalam perjuangannya untuk merdeka dan bebas dari belenggu penjajah, pemuda di masa sekarang juga harus gigih untuk mengaktualisasikan kemerdekaan menjadi pilar kemajuan bangsa.

Bagi bangsa Indonesia, faktor pemuda merupakan wujud kekuatan potensial yang selalu menunjukkan kehadirannya dalam seriap peristiwa sejarah perjuangan bangsa. Kualitas pemuda ialah investasi utama bagi bangsa untuk memenuhi tuntutan politik dalam lingkungan globalisasi yang kian tak terelakkan. Sejarah telah mencatat bahwa kaum muda juga berperan dan berpartisipasi aktif dalam setiap gerakan politik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai contoh, Soekarno aktif dalam gerakan politik ketika ia baru berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku HBS. Begitu juga dengan Moh. Hatta yang juga aktif sejak masih belia (muda). Bahkan Syahrir ketika aktif di Bandung memimpin “Golongan Merdeka”, baru berusia 23 tahun, dan menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama ketika masih berusia 35 tahun.

Pemuda sekarang harus lebih maju dan lebih gigih dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Sosok pemuda ideal bagi bangsa Indonesia adalah sosok pemuda yang berjiwa nasionalis, yang mempunyai cita-cita tinggi untuk kemajuan bangsa. Pemuda tersebut adalah sosok yang progressif-revolusioner.

F. Masalah Generasi Muda

Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain sebagai berikut:

- a. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda.
- b. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya
- c. Belum seimbang antara jumlah generasi pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun nonformal. Tingginya jumlah putus sekolah karena berbagai sebab bukan hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan seluruh bangsa.
- d. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran di kalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas oleh nilai-nilai (kekuasaan, rakyat, dan sebagainya).

G. Pengertian Konflik Politik

Pengertian konflik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, ketika keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari kedua pihak. Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan reformasi. Konflik mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, antara individu dan kelompok atau pemerintah. Jadi konflik politik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sebaliknya secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

H. Penyebab Konflik Politik

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik itu mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Yang dimaksud dengan kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara cultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal cultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsure cultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain.

Konflik dalam masyarakat dibedakan menjadi macam-macam bentuk konflik. Diantaranya:

1. Konflik Pribadi atau Individu

Konflik ini terjadi antara orang per orang. Masalah yang melandasi konflik pribadi atau individu ini adalah masalah pribadi. Konflik ini bisa terjadi jika sejak awal diantara mereka sudah tidak ada rasa simpati dan tidak saling menyukai. Namun bisa juga terjadi pada orang yang sudah lama saling kenal dan menjalin hubungan baik. Dalam perjalanan persahabatan itu terjadi konflik yang tidak bisa disatukan.

2. Konflik Rasial

Konflik Rasial adalah pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik Rasial umumnya terjadi karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul dan paling sempurna di antara ras lainnya.

3. Konflik Politik

Masalah politik sering mengakibatkan terjadinya konflik diantara masyarakat. Konflik politik merupakan konflik yang menyangkut golongan-golongan dalam masyarakat maupun diantara negara-negara yang berdaulat.

4. Konflik Antarkelas Sosial

Konflik antarkelas sosial merupakan pertentangan antara dua kelas sosial. Konflik itu terjadi umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan antara kedua golongan tersebut.

5. Konflik Internasional

Konflik internasional, yaitu pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok Negara (blok), karena perbedaan kepentingan. Banyak kasus terjadinya konflik internasional sebenarnya bermula dari konflik dua negara karena masalah politik dan ekonomi. Konflik berkembang menjadi konflik internasional karena masing-masing pihak mencari kawan atau sekutu yang memiliki kesamaan visi atau tujuan terhadap masalah yang dipertentangkan.

6. Konflik Antar Kelompok

Konflik antar kelompok terjadi karena persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama atau karena pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Selain itu, karena ada pemaksaan agama, dominasi politik, atau adanya konflik tradisional yang terpendam.

7. Konflik Antar Generasi

Konflik antar generasi adalah konflik yang terjadi karena adanya mobilitas sosial yang menyebabkan pergeseran hubungan antara generasi satu dengan generasi lain. Dengan demikian, terjadilah suatu permasalahan, yang satu ingin mempertahankan nilai yang sama, sedangkan yang lain ingin mengubahnya.

8. Konflik Antar Penganut Agama

Dengan dijiwai toleransi dan saling menghormati, kehidupan beragama di Indonesia dapat dikatakan rukun. Meskipun demikian, dalam hubungan antar penganut agama, mungkin saja timbul kesalahpahaman karena sikap prasangka negative dari penganut agama yang satu terhadap yang lain.

Simon Fisher, dkk. (2000), dalam bukunya *Working With Konflik: Skill dan Strategis For Action* (diterjemahkan S.N. Kartikasari, dkk., “ mengelola konflik ketampilaan dan strategi untuk bertindak), menjelaskan tentang berbagai teori penyebab terjadinya konflik :

1. Teori hubungan masyarakat

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya polarisasi yang terus terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah :

- a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang mengalami konflik.
- b. Mengusahakan toleransi agar masyarakat bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

2. Teori negoisasi prinsip

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori negoisasi prinsip ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan mendorong pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkonflik untuk melakukan negoisasi yang dilandasi kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak atau semua pihak (win-win solution for all).

3. Teori kebutuhan manusia

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau sengaja dihambat oleh pihak lain. Kebutuhan dasar manusia biasanya menyangkut tiga

hal, yakni kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Sasaran yang dicapai teori ini adalah: Membantu pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan secara bersama-sama mengenai kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi sehingga memperoleh pilihan-pilihan (alterantif-alternatif) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

I. Tujuan Konflik Politik

Adapun tujuan konflik sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan.
2. Disatu pihakhendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki.Misalnya konflik yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun 1977, 1982, 1987 dan 1992 antara partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berupaya keras mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Golongan Karya (GOLKAR) yang berupaya keras pula mempertahankan kursi mayoritas yang selama ini dipegangnya di DPR dan DPRD.

J. Macam-Macam Konflik Politik

Konflik politik dibagi menjadi dua macam.Kedua macam ini meliputi konflik positif dan konflik negative.Yang dimaksud dengan konflik positif ialah konflik yang tak mengancam eksistensi system politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti : partai politik, badan-badan perwakilan rakyat,pengadilan, pemerintah, pers dan forum-forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya, konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam

eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi. Kategorisasi ini mengandung kelemahan. Apabila mayoritas masyarakat memandang lembaga dan struktur yang ada tidak mencerminkan kepentingan umum maka konflik yang negatif.

K. Contoh-Contoh Konflik Politik

1. Contoh konflik politik yang terjadi di berbagai negara:

- a. Konflik Vietnam berubah menjadi perang.
- b. Konflik Timur Tengah merupakan contoh konflik yang tidak terkontrol, sehingga timbul kekerasan. hal ini dapat dilihat dalam konflik Israel dan Palestina.
- c. Konflik Katolik-Protestan di Irlandia Utara memberikan contoh konflik bersejarah lainnya.
- d. Banyak konflik yang terjadi karena perbedaan ras dan etnis. Ini termasuk konflik Bosnia-Kroasia, konflik di Rwanda, dan konflik di Kazakhstan.

2. Contoh konflik politik yang terjadi di Indonesia:

a. Peristiwa Madiun

Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifoeddin. Pada saat itu hingga era Orde Lama berakhir, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun, dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan

Pemberontakan PKI Madiun. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

**Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa bahwa tuduhan PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru dan sebagian pelakunya berasal dari Orde Lama.

b. Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil

Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.

c. Pemberontakan DI/TII

Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada dimasa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya

dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir", sesuai dalam Qur'aan Surah Al-Maidah, ayat 50. Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat (berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah), Sulawesi Selatan dan Aceh. Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

d. Peristiwa Andi Azis

Peristiwa Andi Azis Adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Azis, seorang bekas perwira KNIL untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur, dan enggan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Azis adalah seorang bekas Perwira KNIL yang bergabung Ke APRIS. Ia diterima masuk APRIS. Pada hari pelantikanya disaksikan oleh Letkol Mokoginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Setelah itu ia menggerakkan pasukannya menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI termasuk Mokoginta. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas KNIL bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Pada 8 April 1950 pemerintah mengultimatum yang isinya bahwa Andi Azis untuk datang ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan Waktu 4 x 24 jam namun tidak diindahkan. Setelah batas waktu terlewati, pemerintah mengirimkan pasukan dibawah Kolonel Alex Kawilarang dan hasilnya Pada Tanggal 15 April 1950 ia datang ke Jakarta untuk Menyerahkan diri.

e. Konflik Papua

Konflik Papua adalah konflik di Papua dan Papua Barat di Indonesia. Karena daerah ini menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963, akibatnya Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka / OPM) telah melancarkan pemberontakan berskala kecil untuk meminta Papua menjadi negara sendiri. Pengibaran bendera Bintang Kejora dan protes damai adalah hal yang ilegal untuk dilakukan dan sangat dilarang. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, sehingga semakin memanaskan konflik.

f. Pemberontakan di Aceh

Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri (2003-2004) untuk menyerang GAM tidak berhasil karena gempa bumi beserta Tsunami yang terjadi di Samudra Hindia pada tahun 2004 keburu menerjang Aceh sehingga mengakibatkan kehancuran bagi seluruh pihak yang ada di Aceh, baik itu TNI, POLRI, GAM, maupun masyarakat Aceh sendiri. Akibat bencana alam tersebut, sehingga menyebabkan diadakannya persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan.

g. Gerakan 30 September

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

L. Kesimpulan

Pemuda diidentikkan dengan kaum muda yang merupakan generasi bangsa, yang akan menentukan perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Sebagai seorang mahasiswa/mahasiswi kita adalah pemuda yang memiliki intelektual yang dapat berpikir demi perubahan dan kemajuan negara ini. Telah kita ketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai.hal ini merupakan pengertian idiologis dan kultural daripada pengertian ini. Di dalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karna pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan

Konflik politik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legeslatif, yudikatif dan eksekutif. Sebaliknya secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya,juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

MODUL VI

KRISIS POLITIK DAN PERJUANGAN

A. Politik

Politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Kata Politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan teta. Arti dari kata polis sendiri yaitu kota/negara sedangkan untuk kata teta yaitu urusan.

1. Aristoteles

Politik yaitu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

2. Joice Mitchel

Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

3. Roger F. Soltau

Bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

Jika dilihat secara Etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "kebijakan". Melihat kata "kebijakan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut.

B. Sistem Politik Pada Masa Reformasi

Keadaan Politik Sekarang Dalam Era Reformasi

Keadaan dewasa ini meskipun sekarang demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal.

Kebijakan yang muncul pada masa reformasi :

1. Kebijakan Otonomi Daerah Era Reformasi

Dalam era reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu :

- a. UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU yang merupakan revisi atas UU yang disebut pertama.
- c. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 dinilai, baik dari segi kebijakan maupun segi implementasinya, terdapat sejumlah kelemahan. Oleh karena itulah kebijakan tersebut mengalami revisi yang akhirnya menghasilkan UU No.32 tahun 2004.

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi sesungguhnya kata lain dari dekosentrasi. Sedangkan Dekosentrasi itu sendiri adalah pengalihan beberapa kewenangan atas tanggung jawab administrasi dalam suatu kementerian atau jawatan. Disini tidak ada transfer kewenangan yang nyata, bawahan hanya menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya. Dalam bahasa UU otonomi daerah, dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Ada beberapa alasan kenapa UU No. 22 tahun 1999 lahir. Hal ini lahir karena daerah menuntut kebebasan di era keterbukaan politik, juga karena pemerintah pusat ingin mengatasi masalah disintegrasi yang melanda Indonesia.

Ada beberapa ciri yang menonjol dari UU ini, yaitu:

- a. Demokrasi dan demokratisasi.
- b. Mendekatkan pemerintah dengan rakyat.
- c. Sistem otonomi luas dan nyata.
- d. Tidak menggunakan sistem otonomi yang bertingkat.
- e. Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai oleh anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN).

Apabila dikaji secara seksama, tampak jelas bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi masih setengah hati. Pemerintah tidak rela dalam memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 7 (1) UU No. 22 tahun 1999, yang menyatakan bahwa: "kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

3. Kebijakan Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004

UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, baik dari segi kebijakan maupun dari aspek implementasi, terdapat sejumlah kelemahan-kelemahan. Dari sisi kebijakan yang sebagaimana diuraikan sebelumnya, mengandung sisi-sisi kelemahan sehingga memunculkan dampak negatif dalam implementasi otonomi daerah.

Jadi, reformasi politik yaitu perubahan secara drastic untuk perbaikan untuk perbaikan di bidang politik di suatu masyarakat atau negara. Reformasi politik yaitu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk merubah sistem yang sudah ada sebelumnya demi kebaikan bersama. Gerakan reformasi dialatarbelakangi oleh krisis pada masa

pemerintahan orde baru. Krisis tersebut antara lain krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis sosial dan krisis kepercayaan.

a. Krisis politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya.

b. Krisis sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.

c. Krisis kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

C. Dampak dan Pengaruh Reformasi Politik

1. Positif

- a. Reformasi telah menghasilkan para politisi yang dapat memasuki kancah politik pasca reformasi. Kyai, ustadz, aktivis organisasi, dan kaum terpelajar kemudian memasuki kancah politik. Andaikan tidak ada reformasi, maka sangat tidak mungkin seorang aktivis organisasi, pengusaha, dan bahkan kyai dapat menjadi bupati, gubernur apalagi menteri.
- b. Adanya kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak pernah direalisasikan pada masa Orde Baru
- c. Berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah..
- d. Perbaikan bidang HAM yang pada masa Orde Baru banyak dilanggar oleh pemerintah sendiri
- e. Semakin tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, terutama dalam pembentukan partai.
- f. Semakin diterapkannya otonomi daerah, dimana kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah pusat tetapi daerah juga diberi kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri
- g. Keadilan semakin terasa menyeluruh pada masyarakat Indonesia. Misalnya masyarakat etnis Tionghoa menjadi sama haknya dengan WNI lainnya, pengakuan agama Konghucu, dan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai libur nasional.
- h. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah).
- i. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).

2. Negatif

Adanya berbagai kepentingan sehingga terindikasi dengan jelas kepentingan pribadi dan golongannya lebih dominan dari kepentingan bangsa dan negara. Orientasi para elit politik cenderung lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan golongannya ketimbang memikirkan persoalan bangsa yang semakin rumit. Makin bertambahnya jumlah oknum elit politik yang sudah menjadi anggota dewan terjerat dengan kejahatan korupsi kondisi ini menandakan betapa perekrutan anggota kader partainya tidak lagi berdasarkan kualitas pribadi namun lebih cenderung kedekatan dan unsur menguntungkan partainya. Runtuhnya budaya malu dari para elit politik selalu mempertontonkan tindakan-tindakan yang negatif sehingga secara langsung dapat menumbuhkan krisis ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik.

- a. Reformasi telah menghasilkan banyak orang yang kemudian memasuki rumah tahanan (rutan), karena kesalahan yang dilakukannya.
- b. Maraknya kerusuhan akibat demonstrasi yang dilakukan para aktivis sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat.
- c. Kebebasan pers disalahgunakan banyak pihak (penguasa) untuk mencari keburukan dari elit-elit politik yang menjadi saingan politiknya. Sehingga yang terjadi perpecahan antar partai koalisi, bahkan perpecahan di tubuh partai itu sendiri.
- d. Semakin maraknya intervensi asing (teroris) sebagai akibat kelemahan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Juga akibat sifat pemerintahan Indonesia yang terlalu terbuka terhadap luar negeri.
- e. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.
- f. Timor timur lepas dari wilayah republik Indonesia
- g. Adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan public yang diembanya

D. Dampak reformasi di bidang ekonomi

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan.

E. Kesimpulan

Politik yaitu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Reformasi politik yaitu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk merubah sistem yang sudah ada sebelumnya demi kebaikan bersama. Gerakan reformasi dialatarbelakangi oleh krisis pada masa pemerintahan orde baru. Krisis tersebut antara lain krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis sosial dan krisis kepercayaan. Pada masa reformasi, masyarakat di beri keleluasaan untuk mendirikan partai politik dengan ideologi yang beragam, sehingga masyarakat umum atau rakyat pun lebih terasa bebas dalam menyalurkan aspirasinya. Selain itu beberapa keorganisasian yang tumbuh dalam masyarakatpun semakin beragam dan terlihat semakin aktif dalam memengaruhi kebijakan publik yang berkenaan dengan bidang yang mereka tekuni. Sehingga dari disini dapat terlihat bahwa aspirasi masyarakatpun semakin dapat tereksplorasi dengan mudah dan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak pemerintah seperti selama masa orde lama dan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

MODUL VII

PEMUDA DAN PENGALAMAN BERPOLITIK MAHASISWA

A. Hakikat Pemuda

1. Definisi Pemuda

Secara hukum pemuda adalah manusia yang berusia 15-30 tahun, secara biologis yaitu manusia yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seperti adanya perubahan fisik. Secara agama adalah manusia yang sudah memasuki fase aqil baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi pria biasanya pada usia 11-15 tahun, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid biasanya terjadi pada usia 9-13 tahun.

Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya terbebani berbagai macam-macam harapan, terutama dari generasi lainya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda merupakan harapan sebagai generasi penerus sebelumnya, generasi yang mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan.

2. Macam-Macam Pemuda

Macam-macam pemuda dikaji dari peran dalam masyarakat:

a. Jenis Pemuda Urakan

Yaitu pemuda yang tidak bermaksud mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Tidak ingin mengadakan perubahan dalam kebudayaan, akan tetapi ingin kebebasan bagi dirinya sendiri, kebebasan untuk kehendak sendiri.

b. Jenis Pemuda Nakal

Pemuda-pemuda ini tidak ingin, tidak beriman dan tidak bermaksud untuk mengadakan perubahan masyarakat ataupun kebudayaan, melainkan berusaha memperoleh manfaat bagi masyarakat dengan menggunakan tindakan yang mereka anggap menguntungkan dirinya tetapi merugikan masyarakat.

c. Jenis Pemuda Radikal

Pemuda-pemuda radikal bereinginan untuk mengadakan perubahan revolusioner. Mereka tidak puas, tidak biasa menerima kenyataan yang

mereka hadapi dan oleh sebab itu mereka berusaha baik secara lisan maupun tindakan rancangan jangka panjang asal saja keadaan berubah sekarang juga.

d. Jenis Pemuda Agamis

Pemuda yang dalam setiap tingkah lakunya sehari-hari selalu berpegang teguh terhadap agama. Melakukan perintah –Nya dan menjauhi larangan –Nya.

B. Hakikat Politik

Definisi politik sangat variatif, adayang berupa positif dan ada yang berupa negatif. Politik sering didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kewenangan, suatu proses pembuatan keputusan secara kolektif, suatu lokasi sumber daya yang langka (the allocation of scarce resources), atau sebagai area pertarungan kepentingan yang penuh muslihat (Heywood, 2004;52). Menurut dimensi IslamPolitik adalah ilmu dan kemahiran. Sejauh makna politik didapat difahami dengan nilai, pemahaman dan etika yang tepat oleh mahasiswa.

C. Sejarah Pergerakan Mahasiswa

Mahasiswa merupakan salah satu elemen penting dalam setiap episode panjang perjalanan bangsa ini. Hal ini tentu saja sangat beralasan bagaimana pentingnya mahasiswa yang selalu menjadi actor perubahan dalam setiap momen-momen bersejarah di Indonesia. Sejarah telah banyak mencatat, dari mulai munculnya Kebangkitan nasional hingga Tragedi 1998, mahasiswa selalu menjadi guard terdepan. Beberapa taun belakangan ini telah banyak tercatat bahwa sudah beberapa kali mahasiswa menancapkan taji intelektualisasinya secara aplikatif dalam memajukan peradaban bangsa ini dari Masa penjajahan Belanda, Masa penjajahan Jepang, Masa pemberontakan PKI, Masa Orde Lama, Hingga Masa Orde Baru, peran mahasiswa tidak pernah absen dalam catatan peristiwa penting tersebut.

1. Tahun 1908

Dalam sejarah peradapan bangsa Indonesia, ada beberapa catatan peristiwa yang layak kita pandang sebagai awal mula pergerakan mahasiswa di tanah air. Pergerakan tersebut bermula pada tahun 1908. Pada masa itu mahasiswa-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA mendirikan sebuah wadah pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo, dimana organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Wadah ini merupakan bentuk sikap kritis mahasiswa tersebut terhadap kolonialisme Belanda yang menurut mereka sudah seharusnya dilawan dan masyarakat harus dibebaskan dari bentuk penguasaan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa ini, walaupun terkesan gerakan yang mereka lakukan masih menunjukkan sifat primordialisme Jawa.

Organisasi ini berdiri berawal dari kegiatan akademi berupa diskusi rutin di perpustakaan STOVIA yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Indonesia yang belajar di STOVIA antara lain Soetomo, Goernawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman. Melalui diskusi itu mahasiswa-mahasiswa tersebut mulai memikirkan nasib masyarakat Indonesia yang makin memprihatinkan ditengah kondisi penjajahana dan selalu dianggap bodoh oleh Belanda, selain itu di perpaham dengan kondisi para pejabat pemerintahan pada saat itu dari kalangan pribumi (pangreh praja) yang justru makin menindas rakyat demi kepentingan pribadi dan kelanggengan jabatan, seperti menarik pajak yang tinggi pada rakyat untuk menarik simpati atasan dan pemerintahan Belanda. Selain itu, pada tahun 1908 ini juga, mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi di Belanda yaitu Drs. Mhd. Hatta mendirikan Organisasi Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonisische Vereeninging pada tahun 1922. Organisasi ini awalnya merupakan suatu wadah kelompok diskusi mahasiswa yang kemudian orientasi pergerakannya lebih jelas dipertajam dengan bergantinya nama organisasi ini menjadi Perhimpunan Indonesia. Melalui majalah Indonesia Merdeka, mereka yang tergabung dalam organisasi ini mulai gesit dalam meluncurkan propaganda pergerakannya, sudah banyak artikel yang

sudah dimuat dalam majalah tersebut yang mengkritisi bagaimana kondisi bangsa pada saat itu, sampai muncul statement yang mengatakan bahwa Bangsa Indonesia tidak menyebut negaranya dengan sebutan Hindia Belanda. Termasuk dalam majalah tersebut memuat tulisan yang disebut manifesto 1925 yaitu isinya antara lain:

- a. Rakyat Indonesia seharusnya dipimpin oleh pemerintah yang dipilih oleh mereka sendiri.
- b. Dalam mempertahankan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun dan;
- c. Ada Tanpa persatuan kukuh dari berbagai unsure rakyat perjuangan itu sulit dicapai.
- d. Selain itu, masih ada organisasi pemuda yang lain seperti Indische Partij yang secara radikal menyuarakan kemerdekaan Indonesia, selain itu juga ada Sarekat Dagang Islam, dan muhamadiyah yang arah pergerakan politiknya lebih condong ke ideologi nasionalisme demokratik yang berlandaskan Islam. Yang perlu kita catat dalam sejarah kemahasiswaan periode ini adalah kita catat dalam sejarah kemahasiswaan periode ini adalah ketika inisiatif beberapa mahasiswa pada Tahun 1908 tersebut telah memunculkan sebuah momentum bersejarah yang memperingati setiap tahun sebagai hari kebangkitan nasional yang jatuh pada saat Boedi Oetomo didirikan. Momentum inilah yang telah menjadi batu loncatan awal bagi setiap pergerakan bangsa di tahun-tahun berikutnya.

2. Tahun 1928

Sejarah ini berlanjut pada periode berikutnya di tahun 1928. Pada awalnya, mahasiswa di Surabaya yang bernama Soetomo pada tanggal 19 Oktober 1924 mendirikan studi Indonesia (indonesische Studie-club). Di tempat yang berbeda, Soekarno dan kawan-kawan dari sekolah tinggi teknik (ITB) di Bandung berinisiatif untuk mendirikan kelompok studi umum (allegemeene Studi Club) pada tanggal 11 Juli 1925. Pembentukan kedua kelompok diskusi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap perkembangan pergerakan politik mahasiswa yang semakin tumpul pada masa itu.

Kemudian pada tahun 1926, terbentuklah organisasi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) yaitu merupakan organisasi yang berusaha untuk menghimpun seluruh mahasiswa di Indonesia dan lebih menyuarakan yang namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa. Hal tersebutlah yang kemudian mereka realisasikan dengan menyelenggarakan sebab kongres paling bersejarah dalam dunia kepemudaan mahasiswa di tanah air, yaitu kongres pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928 yang kemudian menghasilkan sumpah pemuda yang sangat bersejarah tersebut.

3. Tahun 1945

Periode ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, peran pemuda mahasiswa juga tidak lepas dan terlihat sangat vital dalam mewujudkan suatu misi besar bangsa Indonesia pada saat itu yaitu melepaskan diri dari belenggu penjajahan atau merebut kemerdekaan. Kondisi pergerakan mahasiswa pada saat itu tidak semudah pada periode-periode sebelumnya. Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelanggaran terhadap segala kegiatan yang berbau politik, dan hal ini di tindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan.

Dan secara praktis, akhirnya mahasiswa-mahasiswa pada saat itu mulai menurunkan inisiatif pergerakannya dan lebih mengerucutkannya dalam bentuk kelompok diskusi. Yang berbeda pada masa itu adalah mahasiswa-mahasiswa lebih memilih untuk menjadikan asrama mereka sebagai markas pergerakan. Dimana terdapat 3 asrama yang terkenal dalam mencetak tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah, yaitu asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Melalui diskusi di asrama inilah kemudian lahir tokoh-tokoh yang nantinya bakal menjadi motor penggerak penting munculnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut secara radiakal dan melalui pergerakan bawah tanah melakukan desakan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah melalui radio mereka mendengar bahwa telah terjadi insiden bom atom di Jepang, dan mereka berpikir inilah saat yang tepat untuk mendeklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Mahasiswa-mahasiswa yang terdiri dari Soekarni dan Chairul Saleh inilah yang akhirnya terpaksa menculik tokoh proklamator tersebut sampai ke Rengas Dengklok agar lebih memberikan tekanan kepada mereka untuk lebih cepat dalam memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa inilah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa Rengas Dengklok.

4. Tahun 1966

Pada masa setelah kemerdekaan, mulai bermunculan secara bersamaan organisasi-organisasi mahasiswa di berbagai kampus. Berawal dari munculnya organisasi mahasiswa yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta, yang dimotori oleh Lafran Pane dengan mendirikan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tanggal 5 Februari 1947. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah pergerakan mahasiswa yang dilatarbelakangi oleh 4 faktor utama yang meliputi Situasi Dunia Internasional, Situasi NKRI, Kondisi Mikrobiologis Umat Islam di Indonesia, Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan. Selain itu pada tahun yang sama, dibentuk puluhan Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia

(PPMI) yang didirikan melalui kongres pemuda di Magelang. Lalu pada waktu yang berikutnya didirikan juga organisasi-organisasi mahasiswa yang lain seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berhaluan pada ideologi Marhaenisme Soekarno, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GAMSOS) yang lebih cenderung ke ideologi Sosialisme Marxist, dan Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang lebih berpandangan komunisme sehingga cenderung lebih dekat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai imbas dari kemenangan PKI pada Pemilu 1955 organisasi CGMI cenderung lebih menonjol dibandingkan dengan organisasi-organisasi mahasiswa-mahasiswa lainnya.

Namun justru inilah yang menjadi cikal bakal perpecahan pergerakan mahasiswa pada saat itu yang disebabkan karena adanya kecenderungan CGMI terhadap PKI yang tentu saja dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan politik PKI. Secara frontal CGMI menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi-organisasi mahasiswa lainnya terutama dengan organisasi HMI yang lebih berazaskan Islam. Berbagai bentuk propaganda politik pencitraan negatif terus di bombardir oleh CGMI dan KPI kepada HMI, beberapa bentuk propaganda yang mereka wujudkan yaitu salah satunya melalui artikel surat kabar yang berjudul *Quo Vadis HMI*. Perseteruan antara CGMI dan HMI semakin memanas ketika CGMI berhasil merebut beberapa jabatan di organisasi PPMI dan juga GMNI, terlebih setelah diadakan kongres mahasiswa V tahun 1961.

Atas beberapa serangan yang terus menerus dilakukan oleh pihak PKI dan CGMI terhadap beberapa organisasi mahasiswa yang secara ideologi bertentangan dengan mereka, akhirnya organisasi mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), PMKRI, PMII, Sekretariat Bersama Organisasi-Organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI), mereka sepakat untuk membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Dimana tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan

memiliki kepemimpinan. Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dll.

Berawal dari semangat kolektivitas mahasiswa secara nasional inilah perjuangan mahasiswa inilah yang dikenal sebagai gerakan angkatan '66 inilah yang kemudian mulai melakukan penentangan terhadap PKI dan ideology komunisnya yang mereka anggap sebagai bahaya laten Negara dan harus dibasmi dari bumi nusantara. Namun sayangnya, ditengah semangat idealism mahasiswa pada saat itu ada saja godaan datang kepada mereka yang pada akhirnya melunturkan idealisme perjuangan mereka, dimana setelah masa orde lama berakhir, mereka yang dulunya berjuang untuk meruntuhkan PKI mendapatkan hadiah oleh pemerintahan yang sedang berkuasa dengan disediakan kursi MPR dan DPR serta diangkat menjadi pejabat pemerintahan oleh penguasa orde baru. Namun ditengah gelombang peruntuhan idealisme mahasiswa tersebut, ternyata ada sosok mahasiswa yang sangat dikenal idealismenya hingga saat ini dan sampai sekarang tetap menjadi panutan para aktivis mahasiswa di Indonesia, yaitu Soe Hok Gie. Ada seuntai kalimat inspiratif yang diturunkan oleh Soe hok gie yang sampai sekarang menjadi inspirasi perjuangan mahasiswa di Indonesia, secara lantang ia mengatakan kepada kawan-kawan seperjuangannya yang telah berbelok idealismenya dengan kalimat “lebih baik hidup terasingkan dari pada hidup dalam kemunafikan”.

5. Tahun 1974

Periode ini sangat berbeda sekali dengan periode sebelumnya di tahun 1966, dimana pada masa pergerakan mahasiswa tahun 1966 mahasiswa melakukan afiliasi dengan pihak militer dalam menumpas PKI. Pada periode 1974 ini, mahasiswa justru berkofrontasi dengan pihak militer yang mereka anggap telah menjadi alat penindas bagi masyarakat. Gelombang perlawanan bermula sejak dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap menyengsarakan rakyat. Selain itu, issue pemberantasan korupsi juga dianggap lantang digalakan oleh mahasiswa yang mendesak agar pemerintah lebih tegas dalam menjerat koruptor yang terdiri dari pejabat pemerintahan saat itu. Melalui pergerakan inilah muncul gerakan yang sebut “Mahasiswa Menggugat” yang dimotori oleh Arif Budiman dan Hariman Siregar yang menyuarakan isu korupsi dan kenaikan BBM. Menyusul pergerakan mahasiswa yang terus meluas, secara miasatif mahasiswa membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo.

Namun ketika kebusukan-kebusukan rezim pemerintahan orde baru terus mencuat di permukaan, dengan serta merta pemerintah melakukan berbagai rekayasa politik guna meredakan protes massa dan mempertahankan status quo, terlebih menjelang pemilu tahun 1971.

Namun hal tersebut tidak juga berhasil dalam meredakan gelombang protes mahasiswa, secara bersama-sama, masyarakat dan mahasiswa terus melancarkan sikap ketidakpercayaan mereka terhadap 9 partai politik dan Golongan Karya yang selama ini menjadi wadah aspirasi politik mereka dengan munculnya Deklarasi GolongansPutih(Golput) pada tanggal 28 Mei 1971. Dimana gerakan ini dimotori oleh Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan, Arif Budiman. Selain itu mahasiswa juga meluncurkan kritik kepada pemerintah yang telah melakukan pemborosan anggaran negara dengan melakukan beberapa proyek eksklusif yang dinilai tidak perlu untuk pembangunan. Salah satunya adalah dengan mendirikan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang sebenarnya proyek tersebut dijadikan alasan bagi Indonesia untuk terus-menerus menyerap hutang terhadap pihak luar negeri.

Gelombang protes semakin meledak ketika harga barang kebutuhan semakin menular, gelombang protes inilah yang memunculkan suatu gerakan yang dikenal dengan peristiwa Malari pada tahun 1974 yang dimotori oleh Hariman Siregar. Melalui gerakan tersebut lahirlah TriTura Baru selain dari pada 2 tuntutan yaitu Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga.

6.Periode NKK/BKK

Pada masa inilah pergerakan mahasiswa mulai dimatikan peran dan fungsinya oleh pemerintah, yaitu sejak terpilihnya Soeharto untuk yang ketiga kalinya melalui Pemilihan Umum. Maka guna meredam sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah dan untuk mempertahankan status quo pemerintahan maka dikeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) melalui SK No.0156/U/1978. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim.

Menyusul diadakan konsep NKK tersebut maka pemerintah melakukan tindakan pembekuan terhadap beberapa organisasi baru yang kemudian diganti dengan membentuk struktur organisasi baru yang disebut Badan Koordinasi Kampus (BKK). Berdasarkan SK menteri P&K No.037/U1979 kebijakan ini membahas tentang bentuk susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengizinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Namun hal yang terpenting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rector dan pembantu untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.

7. Tahun 1998

Pengekangan terhadap mahasiswa melalui NKK/BKK tidak bertahan lama. Gejolak krisis moneter diseluruh dunia telah membuat kondisi perekonomian di Indonesia terguncang hebat. Hal tersebut dengan ditandai dengan naiknya angka tukar rupiah terhadap dolar yang menembus Rp. 17.000/Dolar. Hal ini tentu sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa yang akhirnya animo pergerakannya mulai bangkit setelah sebelumnya mengalami mati suri yang cukup panjang. Dimulai ketika pada saat 20 mahasiswa UI yang mendatangi gedung MPR/DPR RI dengan tegas menolak pidato pertanggung jawaban presiden yang disampaikan melalui sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional kepada MPR. Kondisi Indonesia semakin tegang sejak harga BBM mulai naik hingga 71% yang ditandai dengan beberapa kerusakan yang terjadi di Medan yang sedikitnya memakan 6 korban jiwa. Kegaduhan berlanjut pada 7 Mei dan 8 Mei. Yaitu peristiwa Cimanggis, dimana pada saat itu telah terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis, yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis.

Dua diantaranya terkena tembakan dileher dilengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata, Kemudian peristiwa Gejayan di Yogyakarta Vang telah merenggut nyawa 1 orang mahasiswa. Hal tersebut tentu saja semakin membuat panas situasi antara mahasiswa dan pemerintahan, terutama terhadap militer yang mereka anggap telah berbuat semena-mena terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan besar - besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pun semakin merebak dan meluas. Di Jakarta sendiri, ribuan mahasiswa telah berhasil menduduki gedung MPR/DPR RI pada tanggal 19 Mei 1998. Atas berbagai tekanan yang terjadi itulah akhir pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00, peresiden RI pada saat itu, yaitu Soeharto resmi mengundurkan diri, dan kemudian menyerahkan jabatannya ke wakil peresidenya yaitu Prof. B.J. Habibie.

D. Mahasiswa Sebagai Penancap Tombak Peradaban

Berdasarkan karakter ristik alaminya, pemuda mahasiswa memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan elemen-elemen masyarakat lain. Sebagai seorang yang memiliki jiwa pemuda, mahasiswa merupakan sosok figur yang bisa dikatakan memiliki karakter yang masih memiliki idealisme yang tinggi dalam berjuang, mereka tidak segan – segan untuk meyuarkan kekesalan dan kritik mereka terhadap siapapun yang mereka anggap menyimpang dari kondisi ideal. Mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktifitas pendidikan yang terbilang tinggi sehingga mereka beranggapan bahwa ilmu yang mereka dapatkan merupakan sebuah senjata pamungkas untuk mengabdikan diri ke masyarakat.

Mahasiswa juga dikenal kreatif dalam membangun ilmu yang didapatkannya serta mengaplikasikannya ke masyarakat karena secara biologis pemuda masih memiliki kondisi yang fresh untuk berpikir dan bertindak secara fisik. Mahasiswa sebagai pemuda juga memiliki keinginan dan sikap kritis yang tinggi terhadap kondisi sekitarnya, dan dengan modal intelektualitas yang ia punya ia se nantiasah mampu untuk memperjuangkan kondisi social yang dilihatnya agar menjadi lebih ideal dan dinamis.

E. Kesimpulan

Pada kesimpulannya, mahasiswa memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change (agen perubahan) dan agent of social control (agen pengawas sosial) kekuatan moralnya dalam berjuang karena pada intinya apa yang ia buat adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang.

Kedua adalah kekuatan intelektualisnya, melalui ilmu pengetahuan yang ia raih di bangku pendidikan, ia senantiasa ingin mengaplikasikan segenap ilmu pengetahuannya untuk gerakan moral dan pengabdian kepada masyarakat, karena baginya ilmu merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus diamankan,

Ketiga adalah mahasiswa sebagai seorang pemuda memiliki semangat dan jiwa muda yang merupakan karakter alami yang pasti dimiliki oleh setiap pemuda secara biologis, dimana melingkupi kekuatan otak dan fisik yang bisa dikatakan maksimal, lalu kreatifitas, respon sifitas, serta kreatifitas dalam membuat inovasi yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

MODUL VIII

KONFERENSI MAHASISWA ASIA AFRIKA

A. Latar Belakang

Konferensi Asia-Afrika atau dikenal juga sebagai Konferensi Bandung, diselenggarakan pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Disponsori oleh lima negara Asia: Birma, Ceylon, India, Indonesia, dan Pakistan, Konferensi Bandung diikuti oleh 29 Negara Asia-Afrika. Menghasilkan Dasasila Bandung (sepuluh prinsip Bandung) yang menjadi kode etik baru dalam dunia internasional atau dikenal juga dengan nama Semangat Bandung. Di tengah ketegangan Perang Dingin, Semangat Bandung dianggap sebagai tonggak munculnya ras kulit berwarna dalam sejarah umat manusia, dan mewakili suara lebih dari setengah dari populasi dunia.

Setelah Konferensi Bandung, Semangat Bandung membentuk tatanan internasional. Selama satu dekade, lebih dari 34 negara yang baru merdeka lahir di Afrika. Prinsip mempromosi perdamaian dunia diadopsi dari Komunike Akhir Konferensi Bandung telah berhasil meloloskan lebih dari 25 negara-negara Asia-Afrika sebagai negara anggota baru PBB. Negara-negara anggota baru, yang dikenal sebagai Kelompok Asia-Afrika, menyuarakan pembentukan dasar bersama sebagai pilar hidup berdampingan secara damai. Pelembagaan Semangat Bandung terwujud dalam pembentukan Gerakan Non-Blok. Oleh karena itu, kerjasama internasional antara negara-negara Asia-Afrika meningkat, seperti Konferensi Asia Afrika Mahasiswa (1956), Dewan Asia Afrika Rakyat Solidaritas (1961), dan Afro-Asian Konferensi Islam (1965)

B. Sejarah Terlaksannya KMAA

Tak banyak referensi yang mengupas sejarah KMAA I tahun 1956. Peran KMAA seakan tenggelam dimakan zaman. Padahal, seperti halnya KAA 1955 menjadi penting karena peran mahasiswa saat itu turut andil menjadi agen kemerdekaan bagi tiap bangsanya.



MENGETUAI DELEGASI INDONESIA. Sebagai Ketua Delegasi Indonesia ke Konferensi Mahasiswa Asia Afrika (KMAA), ES menyampaikan pidato tuan rumah didampingi Achmad Zainal Padang sebagai Sekretaris Delegasi.

KMAA pertama kali diadakan di Bandung pada tanggal 30 Mei – 7 Juni 1956. Dari 46 negara yang diundang hanya 28 negara yang hadir di antaranya wakil-wakil dari Sudan, Madagaskar, Tunisia, Monaco, Republik Demokratik Korea, dan Syria. Konferensi yang dibuka pada 30 Mei 1956 di Bioskop Varia ini bersidang di Gedung Merdeka dan ada pula yang mengadakan pertemuan informal di lobby Hotel Savoy Homann.

Menurut S. Sapiie aktivis Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) yang juga turut mewakili mahasiswa dari Indonesia, delegasi dari Indonesia berjumlah 10 orang yang dipimpin oleh Agusdin Aminudin dan Emil Salim (mantan Menteri

Lingkungan Hidup pada masa Orde Baru) sebagai wakil ketua. Delegasi Indonesia lainnya di antaranya yaitu Ahmad Zainal Padang (Sekretaris Delegasi), Koesnadi Hardjasoemantri, Sabam Siagian, Alwi Dahlan, Nugroho Notosusanto, Anton Moeliono, Wisaksono Noeradi, dan Bintoro Tjokroamidjojo.

Bintoro Tjokroamidjojo perwakilan mahasiswa dari Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia menuturkan bahwa Ketua KMAA terpilih dari Indonesia yaitu Agusdin Aminudin. Emil Salim kemudian menjadi Ketua Delegasi Indonesia. Dalam kesaksiannya, Bintoro beberapa kali berjalan kaki sepanjang Jalan Braga bolak-balik beberapa kali, setiap malam setelah sidang, lalu berdiskusi seru tentang masalah-masalah yang relevan dan perlu diangkat dalam forum KMAA.

Berbeda dengan era pascareformasi 1998 dengan istilah BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), masa itu dunia kemahasiswaan diwarnai oleh berbagai perhimpunan mahasiswa ekstra-universitas yang memiliki latar belakang tertentu (S. Sapiee, 2000). Ada yang berlatar agama, politik, suku, dan tentu saja ada yang umum. Jenis organisasi yang berlatar belakang umum di antaranya yaitu GMD (Gerakan Mahasiswa Djakarta), MMB (Masyarakat Mahasiswa Bogor), PMB (Perhimpunan Mahasiswa Bandung), dan GMS (Gerakan Mahasiswa Surabaya).



INDONESIA DI KMAA. ES bersama delegasi Indonesia ke Konferensi Mahasiswa Asia Afrika (KMAA) pertama pada tahun 1956 di Bandung.

C. Isu Yang diangkat Di KMAA

Konferensi Mahasiswa Asia Afrika 2015 terdiri dari pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara di Asia dan Afrika. Sebulan sebelum konferensi, peserta dibagi menjadi enam komite sesuai dengan 6 fokus pada isu-isu Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika 2015. Kemudian, setiap peserta diharuskan untuk membuat esai tentang pandangan mereka mengenai masalah yang mereka pilih dan solusinya. esai peserta akan dibahas dalam setiap Sidang komite.

Konferensi Mahasiswa Asia Afrika memiliki visi: mensinergikan kerjasama antara pelajar Asia dan Afrika untuk mencari jalan keluar dari permasalahan di berbagai sektor berdasarkan kepemimpinan pemuda Asia dan Afrika. Serta membawa misi:

1. Membangun jaringan di kalangan siswa Asia-Afrika
2. Mendorong solusi bersama untuk mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan Asia dan Afrika
3. Melembagakan kerjasama pelajar Asia-Afrika dalam Forum Studi Asia-Afrika.

Konferensi Mahasiswa Asia Afrika mengangkat tema *Reinvigorating the Bandung Spirit: "Working towards the Asian-African Youth Leadership"* yang terdiri dari enam Komite. Komite tersebut adalah:

1. Leadership to promote the Asian-African cultural values
2. Leadership to promote the inclusive education
3. Leadership to promote the entrepreneurship and socio-entrepreneurship
4. Leadership to promote the function of media as a pillar of democratization process
5. Leadership to promote the Open Source for the digital independence in Asia and Africa
6. Leadership to promote the Asian-African students global network

Sidang Pembukaan

Pada tanggal 29 April 2015 diselenggarakan Pembukaan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika Di Gedung Merdeka, Bandung. Sidang pembukaan ditandai dengan kata sambutan dari :

1. Emil Salim, Ketua Delegasi Indonesia, Konferensi Mahasiswa Asia Afrika 1956
2. Sabam Siagian, Presiden Konferensi Mahasiswa Asia Afrika 1956
3. Zimbabwe Ambassador, Duta Besar Afrika di Indonesia
4. Ras Muhammad, Duta Besar Reggae Indonesia

Setelah kata sambutan sidang pembukaan dilanjutkan dengan sesi pidato dari Sekretaris Jenderal Konferensi Mahasiswa Asia Afrika dan Kepala Delegasi dari Asia dan Afrika:

Pidato diberikan oleh:

1. Yasmin N. Chaerunissa, Sekretaris Jenderal Konferensi Mahasiswa Asia Afrika
2. Mao Sina, Kepala Delegasi Asia
3. Nsikan Ekwere, Kepala Delegasi Afrika

Sebelum memulai persidangan Sidang Komite Konferensi Mahasiswa Asia Afrika semua delegasi mendapatkan Kuliah Umum mengenai Global Leadership yang disampaikan oleh Elisabeth Dewi, Ph.D., seorang dosen dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan. Kuliah umum yang diberikan untuk membangun satu paradigma yang sama terhadap isu-isu yang akan dibahas dalam Sidang Komite. Konferensi Mahasiswa Asia Afrika dihadiri oleh 203 delegasi dari 46 negara Asia dan Afrika yang dibagi kedalam enam Sidang Komite.

Daftar Negara Peserta AASC 2015

1. Afghanistan
2. Afrika Selatan
3. Angola
4. Banglades

5. Benin
6. Burundi
7. Etiopia
8. Gambia
9. Ghana
10. Guinea
11. India
12. Indonesia
13. Jepang
14. Kamboja
15. Kenya
16. Kongo
17. Korea Selatan
18. Laos
19. Lesotho
20. Liberia
21. Libya
22. Madagaskar
23. Malaysia
24. Mali
25. Mesir
26. Mozambik
27. Myanmar
28. Nepal
29. Nigeria
30. Pakistan
31. Papua New Guinea
32. Republik Rakyat Tiongkok
33. Rwanda
34. Senegal
35. Sierra Leone

36. Somalia
37. Sudan
38. Tanzania
39. Thailand
40. Timor Leste
41. Tunisia
42. Uganda
43. Uzbekistan
44. Vietnam
45. Yaman
46. Zimbabwe

Sidang Komite

Peserta Konferensi Mahasiswa Asia Afrika 2015 menyelenggarakan sidang komite pada tanggal 30 April 2015 sampai dengan 1 Mei 2015 yang terbagi kedalam enam Komite, setiap komite bersidang sesuai dengan fokus dari Konferensi Mahasiswa Asia Afrika 2015. Sidang Komite dipimpin oleh Presidium I dan Presidium II.

Sidang Komite terbagi kedalam empat sesi. Sesi sidang pertama dan kedua akan digelar pada 30 April 2015 2015. Sementara itu, sesi sidang ketiga dan keempat akan diadakan pada hari Kamis, 1 Mei 2015. Setiap komite harus memiliki rekomendasi untuk komunike akhir di Sidang pleno.

Sidang Pleno

Hasil dari setiap rekomendasi Komite akan dibawa ke Sidang Pleno. Sidang Pleno dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Hasil akhir dari Sidang Pleno adalah Komunike Akhir. Selanjutnya, hasil dari sidang pleno akan dibacakan pada sesi deklarasi.

Sidang Penutupan

Sidang Penutupan akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Konferensi. Sesi ini akan mencakup:

1. Peluncuran Forum Studi Asia Afrika(FSAA) sebagai Sekretariat Bersama Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. ditandai dengan peluncuran situs asianafrikanstudiesforum.org
2. Pembentukan Komunitas Mahasiswa Asia sebagai bagian dari Forum Studi Asia Afrika (FSAA)

D. Tujuan Terselenggaranya KMAA

Konferensi Mahasiswa Asia Afrika diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, pada tahun 1956. Konferensi ini bertujuan mempromosikan kerjasama budaya yang dihasilkan oleh Sidang Komite kebudayaan Konferensi Bandung. Strateginya adalah mempromosikan kesempatan pertukaran pengetahuan didalam kalangan mahasiswa Asia Afrika dan direkomendasikan sebagai pertimbangan untuk pemerintah negara-negara di benua Asia dan Afrika, Komunike Akhir Konferensi Mahasiswa Asia Afrika menjadi pedoman bagi pengembangan pengetahuan dan jaringan siswa Asia-Afrika di masa depan.

Pasca-Perang Dingin, kebangkitan Semangat Bandung dengan sebuah visi yang baru disetujui dalam KTT Asia-Afrika 2005, New Asian-African Strategic Partnership (NAASP). Skema kerjasama internasional dari negara-negara Asia dan Afrika muncul lebih inklusif. Munculnya aktor-aktor non-negara dalam panggung internasional termasuk peranan masyarakat dalam pelaksanaan NAASP. Kebangkitan dan perbedaan sebagai tahun-tahun tantangan di Asia dan Afrika menuntut peran mahasiswa untuk menuju Kepemimpinan Pemuda Asia Afrika.

Terinspirasi oleh Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, tahun 1955, dan oleh Konferensi Mahasiswa Asia Afrika yang diadakan di Bandung, 1956; dan berdasarkan kesadaran bahwa Asia dan Afrika harus bersatu, bersinergi, dan memimpin bersama-sama untuk menghadapi dunia saat ini maka pada 29 April hingga 2 Mei 2015 diadakanlah Konferensi Mahasiswa Asia Afrika 2015 di Bandung.

E. Kesimpulan

Atas dasar pemaparan dan pembahasan tentang Konversi Mahasiswa Asia Afrika di atas, maka dapat disimpulkan Konversi Mahasiswa Asia Afrika merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Para Mahasiswa untuk mensinergikan kerjasama antara pelajar Asia dan Afrika untuk mencari jalan keluar dari permasalahan di berbagai sektor berdasarkan kepemimpinan pemuda Asia dan Afrika

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

MODUL IX

TRI TUNTUTAN RAKYAT (TRITURA)

A. Latar Belakang

Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:

1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
2. Perombakan kabinet Dwikora
3. Turunkan harga sembako

Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September). Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak.

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Tjakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim meninggal. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban

Tri Tuntutan Rakyat (atau biasa disingkat Tritura) adalah tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia(KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

B. Tuntutan Rakyat (TRI TURA) 10 Januari 1966

Pasca pemberontakan G-30-S/PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tanggal 30 September 1965 telah menimbulkan krisis kepemimpinan nasional yang berdampak buruk terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadi pemicu munculnya gelombang ketidakpercayaan masyarakat, terutama gerakan-gerakan mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Presiden Ir. Sukarno dalam menangani persoalan-persoalan politik, keamanan dan ekonomi pasca pemberontakan G-30-S/PKI (Partai Komunis Indonesia).

Menjelang akhir tahun 1965 pemerintah membuat kebijakan mendevaluasikan rupiah dan menaikkan harga minyak bumi. Kebijakan tersebut menyulut demonstrasi besar-besaran dikalangan mahasiswa. Pada tanggal 10 Januari 1966 Mahasiswa melancarkan tuntutan yang dikenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) meliputi:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI);
2. Retooling Kabinet;
3. Penurunan Harga/Perbaikan Ekonomi.

Tuntutan mahasiswa mendapat sambutan positif dari Team Pelaksana Musyawarah Exponen Angkatan '45. Berita Antara 14 Januari 1966 memberitakan bahwa Team tersebut telah mengemukakan pandangannya, bahwa tuntutan para mahasiswa akhir-akhir ini melalui demonstrasi-demonstrasi perlu mendapat sambutan baik atas dasar factor-faktor obyektif serta situasi kongrit dewasa ini. Tuntutan mahasiswa yang tercermin dalam demonstrasi terus-menerus setiap hari dan dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berpokok pada soal pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, retooling Kabinet Dwikora dan penurunan kenaikan tarif-harga.

Mengenai tuntutan melakukan retooling cabinet yang sekarang ini, Musyawarah Exponen Angkatan '45 dalam pernyataan tersebut yang telah diedarkan menyatakan dukungannya. Musyawarah Exponen Angkatan '45 juga menandakan hendak membantu Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh, salah seorang tokoh angkatan '45, untuk mengadakan konsultasi atas dasar musjawarah

dan mufakat dengan segenap pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diingatkan pentingnya mempertahankan gotong royong dan persatuan progresif revolusioner guna mengatasi situasi tanah air dari ancaman G-30-S/PKI, terutama di bidang ekonomi.

Dalam menunjukkan keinginan membantu Wakil Perdana Menteri III untuk mengadakan konsultasi dengan segenap pihak yang bersangkutan, Musyawarah Exponen Angkatan '45 menyarankan agar kebijakan ekonomi menekankan pada pendekatan produksi dalam rangka memberantas inflasi. Gaji pegawai, buruh dan prajurit setiap bulan minimal harus berada di atas kebutuhan fisik minimum keluarga mereka. Dikemukakan selanjutnya bahwa sementara menunggu perkembangan produksi sebagai alat satu-satunya mencegah inflasi, maka kebutuhan barang-barang pokok harus dicukupi jumlahnya dengan cara apa pun. Segenap alat distribusi harus diawasi secara ketat hingga seluruhnya dikuasai oleh pemerintah sambil melaksanakan Keputusan MPRS tentang pelaksanaan alat-alat distribusi yang dipegang oleh koperasi rakyat. Pernyataan dari Musyawarah Exponen Angkatan '45 ditandatangani oleh Mayor Jenderal Djamin Gintings, Brigadir Jenderal Djuhartono, Brigadir Jenderal Pol. Sujono, SH, Letnan Kolonel Chandra Hasan, Letnan Kolonel Dominggus Nanlohy, Drosek Zakaria Raib, Alizar Thaib, Ishak Djanggawirana, Armansyah, Herman Wanggamihardja, Ismael Agung Witono dan Soekandja.

Masih terkait dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), di Bandung hari Kamis tanggal 13 Januari 1966 terjadi demonstrasi yang diikuti kurang lebih 2.000 mahasiswa dan pelajar untuk menuntut penurunan harga dan pembubaran PKI. Awalnya demonstrasi tersebut nyaris tidak terkendali, akhirnya pihak keamanan dapat membubarkan demonstrasi mahasiswa dan pelajar itu. Dalam demonstrasi tersebut mahasiswa dan pelajar meneriakkan yel-yel "turunkan harga", "kita tidak perlu monumen-monumen lagi", "kita perlu industri", "hancurkan gestapu", "bubarkan PKI".

Dalam kesempatan itu, Walikota Priatnakusumah tidak bisa menyampaikan pendiriannya sewaktu menghadapi demonstrasi tersebut, karena setiap ia akan berbicara, teriakan "kita bosan dengan pidato" menyebabkan pidato

Walikota Priatnakusumah tidak terdengar sampai jauh, karena kabel pengeras suara yang digunakan Walikota berbicara, diputuskan orang.

Kurang lebih tiga jam mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar Bandung berdemonstrasi di halaman kotapraja. Mereka dikoordinasi oleh KAMI, dan dalam kesempatan itu seorang pimpinannya membacakan petisi dan resolusi yang akan mereka sampaikan pula kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Dijelaskan dalam petisi dan resolusi tersebut bahwa tuntutan para mahasiswa dan pelajar Bandung ini adalah mengingat penderitaan rakyat dewasa ini. Disebutkan pula bahwa mahasiswa dan pelajar Bandung solider dengan aksi yang telah dilaksanakan mahasiswa-mahasiswa Ibukota baru-baru ini di Jakarta dalam membela kepentingan rakyat.

Menindaklanjuti demonstrasi mahasiswa yang semakin gencar di berbagai daerah Presidium Pusat KAMI telah menginstruksikan mahasiswa Indonesia khususnya yang berada di Jakarta dan yang bernaung di bawah panji KAMI untuk mempertinggi kewaspadaan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Instruksi itu diberikan berhubung dengan terjadinya insiden antara unsur-unsur Front Marhaenis (Ali-Surachman) dengan mahasiswa-mahasiswa dari kalangan KAMI ketika mereka sedang mendengar amanat Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno di Istana Merdeka. Insiden Istana Merdeka ini telah membawa korban, beberapa orang mahasiswi terpaksa diangkut ke rumah sakit karena terluka.

Kepada pimpinan organisasi-organisasi mahasiswa seperti PMII, PMKRI, GMKI, GMNI, IMADA, HMI, SEMMI, GERMAHII, MAPANTJAS, PELMASI, GMD, IMABA, CSB, GMS, GMRI, KAMI Universitas-Universitas, KAMI Akademi-Akademi, Dewan-Dewan Mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia diserukan oleh Presidium Pusat KAMI agar tetap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan kasar seperti yang terjadi pada demonstrasi mahasiswa sebelumnya. Diserukan agar mahasiswa itu merapatkan barisan dan menyelamatkan revolusi Indonesia di bawah komando Presiden Sukarno dari rongrongan “nekolim” dan antek-antek “gestapu”/PKI.

Ketua Umum Presidium Pusat KAMI, Cosmas Batubara, dalam penjelasannya mengenai insiden di Istana Merdeka menerangkan antara lain bahwa beberapa rombongan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI ketika sedang khidmatnya mendengarkan amanat Presiden Sukarno “telah dicegat dan diprovokasi dan akhirnya dikeroyok oleh segerombolan orang-orang yang bertindak liar dan mata gelap”. Terjadinya insiden tersebut yang menurut Cosmas Batubara telah ditimbulkan oleh golongan Front Marhaenis yang menurut keyakinannya disusupi oleh anasir-anasir CGMI, telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Menurut pendapat anggota pimpinan KAMI tersebut, tindakan liar yang mengakibatkan terjadinya insiden tersebut telah menodai barisan Sukarno yang dikomandokan oleh Pemimpin Besar Revolusi untuk mempersatukan segenap kekuatan rakyat yang progresif revolusioner dalam menghancurkan nekolim dan “Gestapu”/PKI.

Dalam hubungan ini, pada tanggal 21 Januari 1966 ketua KAMI Pusat tersebut menginstruksikan kepada segenap mahasiswa yang tergabung dalam KAMI Pusat di seluruh kota-kota Universitas dan perguruan tinggi di Indonesia harus bersikap sebagai berikut:

1. Tetap merapatkan barisan perjuangan mahasiswa, tetap berdiri di belakang Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
2. Menggalang kekompakan kesatuan segenap potensi mahasiswa dengan semangat rela berkorban, berdisiplin, serta ikhlas mengabdikan menjadi satu front yang bisa diuji kemampuannya oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
3. Terus meningkatkan penghayatan tritunggal Bung Karno-Rakyat-ABRI dalam satu front demi kepentingan rakyat, nusa dan bangsa menghadapi rongrongan nekolim dan unsur-unsur Gestapu/PKI;
4. Mendaftarkan dengan segera pada barisan pendukung Bung Karno pada Gabungan V KOTI untuk tingkat pusat dan Pepelrada setempat untuk tingkat daerah;
5. Tetap waspada akan usaha pecah belah, intrik, adu-domba serta pancingan-pancingan dari pihak nekolim ataupun antek-antek Gestapu/PKI.

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno mengumumkan reshuffle cabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Sukarno, seorang mahasiswa Arief Rahman Hakim Gugur. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa.

Akhirnya, Tujuan dari Tri Tuntutan Rakyat dapat terwujud dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Suharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Selain itu, Supersemar juga mengamanatkan agar meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Surat ini menginstruksikan Mayor Jenderal Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu, salah satu diantaranya ialah membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya.

Mahasiswa yang berjuang saat itu sekarang dikenal dengan angkatan 66 Bung Tomo, April 1966 dengan rendah hati mengakui bahwa Angkatan 66 lebih hebat daripada Angkatan 45. Berbeda dengan Angkatan 45 yang berjuang dengan bedil, Angkatan 66 berjuang tidak dengan senapan, tapi dengan “keberanian, kecerdasan, kesadaran politik, motif yang murni”. Dengan semua itu Angkatan 66 “memberi arah baru pada sejarah nasional Indonesia”. Kendati sejarah tentang peranan Angkatan 66, telah menjadi bagian dari arsip yang berdebu sejalan berlalunya waktu, tetap saja harus dicatat bahwa generasi muda yang bergerak waktu itu adalah kelompok paling konseptual selain tokoh-tokoh kemerdekaan tahun 1945 sepanjang sejarah republik ini.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya kami dapat mengemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Gerakan mahasiswa adalah suatu gerakan mahasiswa dalam bentuk aksi gerakan moral yang dilakukan sebagai usaha untuk perubahan tatanan kehidupan sosial-budaya, ekonomi-politik dan hukum menjadi tatanan yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Pergerakan mahasiswa di Indonesia dimulai pertama kali pada awal abad ke-20. Sebelum populernya gerakan mahasiswa awalnya dikenal dengan gerakan pemuda Indonesia, karena sejak itu bangsa Indonesia masih dalam penjajahan. Pemuda Indonesia pada mulanya perkumpulan pelajar, kemudian menjadi pelopor kemerdekaan, berlanjut menjadi organisasi, kemudian menjadi partai. Selain itu, dalam gerakan mahasiswa dari masa ke masa mempunyai karakteristik sendiri di balik gerakannya. Dan dalam gerakan mahasiswa dari masa ke masa pihak yang terlibat diantaranya mahasiswa, pemerintah, dan militer.
3. Gerakan mahasiswa angkatan 1966 yang menyebabkan mahasiswa melakukan aksi Tritura dikarenakan oleh faktor ekonomi dan faktor terjadinya Gerakan 30 September 1965.
4. Peran mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 1966 ini adalah menyampaikan seruannya mengenai Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) kepada pemerintah. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan mendemonstrasi. Isi Tritura, diantaranya
 - a. Bubarkan PKI.
 - b. Retool Kabinet Dwikora.
 - c. Turunkan harga/ perbaiki ekonomi.
5. Dampak dari gerakan mahasiswa 1966 terhadap pemerintahan orde lama yaitu turun Surat Perintah 11 Maret yang melimpahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto dan lahirnya orde baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

MODUL X SUPERSEMAR

A. Latar Belakang

Pada bidang politik, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang diterapkan Ir. Soekarno seperti membuat suatu pemerintahan yang otoriter di Indonesia. Selain itu, Bung Karno membuat konsep NASAKOM yang berarti nasionalis, agama dan komunis. Kebijakan itulah yang akhirnya membawa perpecahan karena dalam nasionalis, agama dan komunis terdapat perbedaan - perbedaan yang bisa memicu konflik di kemudian hari. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin juga menyebabkan pihak yang bisa mempunyai posisi kuat di pemerintahan bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa.

Pada bidang militer, dwifungsi ABRI yang membuat anggota ABRI bisa menduduki jabatan di bidang politik dan pemerintahan membuat peran ABRI menjadi tidak lazim karena tentara tujuan sebenarnya dibentuk untuk keperluan pertahanan negara. Selain itu, konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi pada masa itu membuat pro dan kontra pada pemerintah dari sejumlah tokoh militer. Dan pada bidang ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang mencapai presentase 650 % membuat harga - harga bahan - bahan pokok melambung tinggi sebagai akibat dari berbagai faktor yang diantaranya kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji tentara.

Akhirnya klimaks dari berbagai masalah diatas terjadi pada akhir tahun 1965 yaitu sebuah peristiwa kontroversial yang melibatkan Partai Komunis Indonesia bernama Gerakan 30 September dan Gerakan Satu Oktober yang lebih dikenal dengan G 30 S/PKI. Hal itu, membuat Indonesia kacau balau karena terjadi pembunuhan para jenderal-jenderal penting ABRI sehingga akhirnya ABRI dibawah Jenderal Suharto dan Kolonel Sarwo Edhie dari KOSTRAD berhasil menghentikannya. Setelah peristiwa itu, maka terjadilah reaksi dari masyarakat berupa Tritura yang berisi Tiga Tuntutan Rakyat pada Pemerintah Republik Indonesia. Untuk menjaga kestabilan dari Republik Indonesia maka dikeluarkanlah Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966.

B. Pembahasan umum Supersemar

Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.

Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkoptik) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

C. Perumusan Supersemar

Tiga orang perwira tinggi yaitu, Mayor Jendral Basuki Rahmat, Brigadir Jendral M.Yusuf, dan Brigadir Jendral Amir Machmud yang telah diberi izin oleh Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk menghadap Presiden Soekarno untuk memohon agar mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan. Adapun yang merumuskan surat perintah tersebut adalah ketiga perwira tinggi, bersama Brigadir Jendral Subur (Komandan Pengawal Presiden Cakrabirawa).

D. Terjadinya Peristiwa Supersemar

Setelah ketiga perwira tinggi menghadap Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jendral Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dibuatlah Surat Perintah Sebelas Maret yang dirumuskan oleh ketiga perwira tinggi dan Brigadir Jendral Subur. Surat tersebut diberikan kepada Jendral Soeharto yang diberi wewenang oleh Presiden Soekarno untuk mengamankan keadaan.

E. Keberadaan Supersemar

Ada yang mengatakan bahwa naskah tersebut ada 3, ketiga naskah Supersemar tersebut disimpan Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI).

Pertama, yakni surat yang berasal dari sekretariat negara. Surat itu terdiri dari 2 lembar, berkop burung garuda, diketik rapi dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Soekarno.

Surat kedua berasal dari pusat penerangan TNI AD. Surat ini terdiri dari satu lembar dan juga berkop burung garuda. Ketika surat versi kedua tampak tidak serapi pertama, tertulis nama Soekarno, versi bahkan terkesan amatiran. Jika versi pertama kali tertulis nama Soekarno, versi kedua tertulis nama Soekarno.

Untuk versi ke-3, lebih aneh lagi. Surat yang terakhir diterima ANRI itu terdiri dari 1 lembar, tidak berkop dan hanya berupa salinan tandatangan Soekarno di versi ketiga ini juga tampak berbeda dari versi pertama dan kedua.

F. Pemerintahan Setelah Supersemar

Setelah surat perintah tersebut diserahkan kepada Jendral Soeharto, Soeharto langsung melakukan tindakan sesuai permasalahan yang sedang memanas. Keesokan harinya setelah surat diberikan yaitu pada tanggal 12 Maret, Soeharto langsung membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Pada tanggal 18 Maret, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang diduga sebagai anggota PKI. Pada tanggal 27 Maret, Soeharto membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan yang berisi orang-orang yang tidak terlibat dalam G 30 S/PKI. Setelah semua tugas selesai, rakyat Indonesia meminta Presiden Soekarno turun dari jabatannya menjadi presiden karena dianggap pro terhadap PKI. Pada tanggal 22 Februari 1967 dengan penuh kebijaksanaan, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto. Hal itu disambut suka cita oleh semua penduduk di Indonesia dan kekacauan pun mereda. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, lahirlah pemerintahan Orde Baru.

Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perkehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

G. Supersemar Diberikan Di Bawah Tekanan.

Tanggal 9 Maret 1966 malam, Hasjim Ning dan M Dasaad, dua pengusaha yang dekat dengan presiden Soekarno diminta oleh asisten VII Men/Pangad Mayjen Alamsjah Ratu Prawiranegara untuk juga membujuk Presiden Soekarno agar menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto.

Jelas upaya ini sepengetahuan Letjen Soeharto. Keduanya kemudian mendapat surat perintah yang ditandatangani sendiri oleh Men/ Pangad Letjen Soeharto yang menyatakan bahwa mereka adalah penghubung antara Presiden Soekarno dan Men/ Pangad. Keduanya berhasil bertemu dengan Presiden Soekarno pada 10 Maret 1966 di Istana Bogor. Hasjim Ning menyampaikan pesan tersebut. Presiden Soekarno menjadi marah dan melempar asbak kepadanya sambil berkata: "Kamu juga sudah pro-Soeharto!" Dari sini terlihat bahwa usaha membujuk Soekarno telah dilakukan, kemudian diikuti dengan mengirim tiga orang jenderal ke Istana Bogor. Sementara itu mantan Kepala Staf Kostrad Kemal Idris mengajukan satu kalimat.

Katanya, "Kalau saya tarik pasukan itu dari Istana, Presiden Soekarno tidak akan lari, kan?" Dengan kata lain, dia ingin mengatakan, kalau "pasukan liar" yang berada di bawah komandonya ditarik dari sekeliling Istana belum tentu ada Supersemar. Seperti diketahui, Brigjen Kemal Idris pada waktu itu mengerahkan sejumlah pasukan dari Kostrad dan RPKAD untuk mengepung Istana. Tujuan utamanya adalah menangkap Dr Soebandrio yang ditengarai bersembunyi di kompleks Istana. Memang pasukan-pasukan itu mencopot identitas mereka sehingga tidak mengherankan Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur melaporkannya sebagai "pasukan tidak dikenal" kepada Presiden Soekarno.

Sebetulnya banyak faktor yang terjadi sebelum tanggal 11 Maret 1966 yang semua menjadikan semacam "tekanan" yang berfokus terhadap Presiden Soekarno. Dan puncak dari tekanan itu datang dari ketiga jenderal di atas. Bila tidak ada demonstrasi dan pasukan tak dikenal yang mengepung Istana di Jakarta tentu peristiwa keluarnya Supersemar di Bogor tidak terjadi.

H. Kesimpulan

Jadi, Supersemar merupakan tonggak lahirnya orde baru pada masa pemerintahan Soeharto. Secara tidak langsung lahirnya Supersemar juga merupakan jalan penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Naskah dan kebenaran isi Supersemar hingga kini masih merupakan sebuah misteri karena tokoh-tokoh yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut sudah meninggal dunia hingga melahirkan berbagai naskah yang berbeda versi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Musthofa, Sh.,Suryandari & Tutik Mulyati. 2009. *Sejarah Untuk SMA/MA Program IPA*.
- Laurencius Simanjuntak. 2012. Dimanakah naskah asli Supersemar?. From <http://www.merdeka.com/peristiwa/di-manakah-naskah-asli-supersemar.html>, 31 Agustus 2014

MODUL XI LAHIRNYA KAMI DAN KNPI

A. Latar Belakang Berdirinya KNPI

Pemuda bagi Bangsa Indonesia adalah kelompok usia yang memiliki nilai serta posisi yang strategis dalam masyarakat. Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia selalu menyertai pemuda yang baik diminta maupun secara sukarela aktif di dalamnya. Bahkan lebih daripada itu, sering kali berbagai moment penting bagi Bangsa Indonesia lahir dari ide, semangat dan kepemimpinan para pemuda. Pemuda yang karena penggolongan usianya, memang selalu berpikir jernih dan bebas dalam menuangkan segala bentuk ide serta gagasannya kepada bangsa dan negara. Katakanlah peristiwa penting bangsa seperti Sumpah Pemuda, persiapan dan pelaksanaan Kemerdekaan RI, atau peristiwa sekitar tahun 1965 yang semuanya melibatkan peran aktif pemuda. Bagi pemuda berbagai peran serta yang dilakukan terhadap sejarah perjalanan bangsa memiliki catatan-catatan tersendiri.

Pemuda Angkatan '28 mencetus Sumpah Pemuda adalah mereka yang berumur antara 15-23 tahun yang ditinjau dari segi pendidikan umumnya duduk di kelas akhir HIS (Hollandsc Inlandsche School), MULO atau HBS 5 tahun, dan AMS (Algemene Middelbaar School). Mereka yang duduk di Hoogere School atau sekolah tinggi atau universitas, cenderung dikatakan bukan pemuda lagi, mereka sudah tokoh nasional. Karena itu tatkala Kasman Singodimedjo tampil sebagai Ketua JIB ketika sudah berusia 28 tahun mendapat kritik dari sementara tokoh JIB sendiri karena dianggap sudah tua.

Pemuda Angkatan '45 rata-rata berusia 25-30 tahun. Aktivis pemuda kala itu pada umumnya adalah mereka yang meninggalkan bangku kuliah saat Jepang mulai dan menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Yaitu dimana ketika golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa menunggu instruksi dari Jepang. Namun golongan tua seperti Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menolak usulan tersebut dan tetap menginginkan agar proklamasi dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hingga pada tanggal 16 agustus 1945 pukul 04.30 Chairul



Saleh dkk mengamankan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI. Sementara itu Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan hingga proklamasi kemerdekaan RI pun berhasil dikumandangkan pada tanggal 17 agustus 1945.

Memasuki tahun 1950 hingga 1965 pertumbuhan partai politik di tahan air bagai "jendawan" di musim hujan". Begitu banyak partai politik yang tumbuh dengan berbagai platform partai yang berbeda-beda. Dan hal inipun berdampak pada aktivitas pemuda dalam berorganisasi menjadi bagian (*onderbouw*) partai politik. Umumnya mereka merupakan kader partai yang menunggu "promosi" menjadi tokoh partai. Saat menunggu itu dapat sebentar namun dapat juga lama. Karena itu usia dari para aktivis pemuda saat itu berkisar 35-45 tahun. Kecenderungan ini berlangsung sampai dengan masa orde baru.

Ketika Orde Baru bangkit bulan Oktober 1965, yang tampil disini justru kelompok/organisasi mahasiswa yang mendapat dukungan dari organisasi pemuda yang tersingkir pada masa orla. Organisasi-organisasi mahasiswa yang turut serta melwan komunis dan meruntuhkan orde lama, kemudian sejak tanggal 25 Oktober 1965 membentuk KMI sekaligus menjadi pelopor bangkitnya orde baru bersama ABRI. Selanjutnya, KAMI sendiri dibubarkan pada bulan Agustus 1966, lalu muncul Laskar Ampera Arif Rachman Hakim. Laskar ini selanjutnya yang mengelola massa melancarkan demonstrasi. Namun dalam perkembangannya, KAMI dan Laskar tidak berhasil merumuskan peran barunya pasca demonstrasi tersebut. Pelan tapi pasti aktivitas pemuda tersebut mulai berkurang.

Para mantan tokoh pemuda tersebut kemudian mendirikan Ikatan atau Yayasan yang menaungi organisasi mereka. Laskar tidak terdengar lagi aktivitasnya, sampai 20 tahun kemudian, berdiri Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA), menyusul berdirinya Yayasan Pemuda Pembangunan Indonesia (YPPI) yang didirikan mantan pimpinan KAMI. Seperti halnya KAMI dan Laskar, kabarnya KAPPI/KAPI juga demikian. Jika kemudian muncul

keinginan untuk mendirikan National Union of Student (NUS) pada tahun 1970, maka formatnya akan mengulangi Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI). Adanya NUS dan MMI formula baru akan melahirkan bipolarisasi MMI VS PPMI seperti terjadi pada tahun 1950-an. Mungkin itu sebabnya banyak pihak yang berkeberatan dengan gagasan mendirikan NUS. Maka kelahiran KNPI merupakan *conditio sine quanon* bagi dunia kepemudaan /kemahasiswaan Indonesia.

B. Pembahasan umum

1. Setting Sosial Politik

a. Perubahan Sosial yang Direncanakan Maupun Tidak Direncanakan

Terhitung sejak Oktober 2008, konstalasi kepemudaan nasional telah disugui fakta adanya **DUALISME DPP KNPI** sebagai produk dua Kongres Pemuda XII (Kongres Ancol dan Kongres Bali) yang mana saat ini terdapat 2 ketua umum KNPI yaitu Taufan Eko Nugroho disatu pihak dan Akbar Zulfakar dipihak lain. Aib ini tentunya telah memecah belah sikap keberhimpunan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tingkat Nasional dan DPD KNPI Provinsi se-Indonesia.

Inilah catatan paling kelam dalam sejarah pemuda pergerakan atau kelembagaan pemuda di Indonesia. Dipicu “hanya” karena perbedaan cara pandang dalam mekanisme organisasi KNPI, pemuda Indonesia era reformasi begitu mudah terbelah. Kondisi yang sangat jauh berlainan dari catatan emas soliditas pemuda Indonesia yang begitu teruji sejak era pergerakan kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan republik.

Tentu kejadian ini amat sangat disayangkan, kondisi yang sepatutnya untuk segera diakhiri, dikembalikan, dan disatukan kembali oleh semua pihak yang terkait didalamnya. Tujuan utamanya tidak lain adalah demi terjaminnya integritas elit pemuda Indonesia yang saat ini dituntut harus mampu berbaris kompak diatas kepentingan bangsa, bukan kelompok apalagi perorangan.

b. Wadah Berhimpun

KNPI dilahirkan pada 23 Juli 1973 sebagai wadah bersatunya seluruh pemuda Indonesia sekaligus wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di Indonesia yang secara antropologis berfungsi menjadi sumber bahan baku dalam sistem siklus kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan bangsa di semua tingkatan.

Keberhimpunan OKP dalam KNPI dilandasi oleh kesamaan nilai-nilai dasar kenegaraan Indonesia yakni ideologi Pancasila yang sekaligus berfungsi sebagai perekat sosial dengan tekad persatuan dan kesatuan yang berwawasan kebangsaan, idealisme, solidaritas antar pemuda, cinta tanah air serta mengabdikan kepada kepentingan nasional yang lebih luas.

Dalam konteks itulah, KNPI mengemban tanggung jawab sebagai wadah berhimpun semua kaum muda bangsa yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan pembinaan pemuda secara generatif serta kepentingan nasional Indonesia sebagai orientasi aktivitas organisasi.

Keberhimpunan OKP di dalam KNPI dipertahankan dengan realita bahwa pada dasarnya OKP dengan ciri khasnya masing-masing membutuhkan adanya institusi perekat untuk mensinergikan berbagai aktivitas kepemudaan. KNPI disepakati sebagai jawabannya untuk mengerjakan hal-hal yang berdimensi lintas OKP, lintas sektoral dan mampu mengatasi kepentingan golongan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KNPI yang di dalamnya berhimpun kader-kader muda pilihan, sudah selayaknya dapat memberikan terobosan-terobosan nyata untuk kemajuan bangsa. Dengan kontribusi demikian, maka eksistensi KNPI akan berdaya guna sebagai satu-satunya wadah berhimpun terbaik bagi pemuda harapan bangsa.

c. Kongres Persatuan atau KLB

DUALISME DPP KNPI adalah aib sejarah dalam perjalanan panjang perjuangan pemuda Indonesia. Sebagai kejadian “contra productive” dengan cita, citra dan idealisme pemuda harapan bangsa, maka tentu semua pihak yang terlibat semestinya menyadari untuk segera mengakhiri dualisme ini secara permanen.

Keterbelahan “induk” organisasi pemuda ini BUKANLAH GENGGSI apalagi prestasi yang patut dipertahankan oleh semua pihak.

Kondisi ini wajib dicegah berlanjut ke fase dualisme jilid 2 sebagai lanjutan dari kongres yang mungkin saja akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Kongres sebagai forum tertinggi organisasi dan wujud pencerminan kedaulatan OKP dan DPD KNPI PROVINSI harus menjadi pengadilan konstitusional untuk mengakhiri krisis. Inilah media terbaik setelah kita tidak juga dapat mengandalkan keputusan di meja hijau bagi solusi dualisme tersebut.

Model kongres yang dapat dipilih tentu tinggal menyisakan dua pilihan yakni Kongres Persatuan atau Kongres Luar Biasa. Menilik pada *feasibility*-nya, kedua kongres ini dapat dijadikan alternatif bagi langkah efektif penyelesaian sengketa.

Kongres Persatuan sejauh ini sudah memasuki meja perundingan kedua belah pihak dengan dimediasi pemerintah. Harapan kita tentu tahapannya akan lebih dipercepat mengingat berbagai kebutuhan mekanisme pengelolaan organisasi KNPI di daerah sangat membutuhkan kejelasan status organisasi KNPI di tingkat pusat.

Tetapi bilamana prospek Kongres Persatuan tersebut buruk karena rivalitas yang masih sangat tinggi diantara kedua belah pihak yang berakibat pada tidak tentunya jadwal penyelenggaraan kongres tersebut, maka opsi berikutnya harus segera dipilih.

Kongres Luar Biasa (KLB) Pemuda 2011 adalah forum terbaik dan konstitusional bagi rekonsiliasi elit pemuda Indonesia. Seluruh *stake holder* pemuda bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebagai pembina berkewajiban mengukung

terwujudnya KLB demi kembalinya integritas dan soliditas pemuda di seluruh Indonesia.

d. Penguohan Kepengurusan DPP KNPI (Pengendalian Terhadap Perubahan Sosial)



Pasca kongres XII yang merupakan awal terjadinya DUALISME KNPI kini berakhir sejak digelarnya Kongres XIII yang digelar oleh kedua kubu DPP KNPI pada 28-29 oktober 2011. Dan saat ini hanya ada satu

kepengurusan dibawah kepemimpinan Bung Taufan Eko Nugroho.

Selanjutnya ketua umum terpilih ini menyatakan obsesinya untuk mengubah paradigma induk organisasi KNPI. Yaitu mengurangi angka pengangguran dikalangan pemuda dengan mendorong kewirausahaan serta meningkatkan rasa kekeluargaan bagi pemuda yang kini mulai memudar. Alasannya, karena masalah utama pemuda adalah pengangguran. Dengan mendorong kewirausahaan bagi pemuda, diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda, karena itu, bangsa ini sangat membutuhkan sosok pemuda yang punya keahlian dan profesionalisme tinggi.

2. Telaah Kepemimpinan (Ideolog) KNPI

a. Kriteria Menjadi Pemimpin

Didalam kepengurusan suatu organisasi dalam hal apapun itu baik keagamaan, politik, olahraga, dan pemuda tentunya memerlukan seseorang yang mampu membawa organisasi supaya bisa terus eksis dan melanjutkan estafet kegiatannya yaitu seorang pemimpin. Tidak terkecuali dalam kepengurusan KNPI. Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum organisasi sesuai dengan AD/ART :

Sebelum memenuhi persyaratan menjadi ketua, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan menjadi anggota pengurus. Untuk dapat dipilih menjadi personalia pengurus Dewan Pengurus Pusat, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :

- 1) Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Nasional sebagai unsur keterwakilan OKP, dan atau Dewan Pengurus Pusat KNPI demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi;
- 2) Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Dewan
- 3) Pengurus sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Kongres dilaksanakan;
- 4) Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) berakhlak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa;
 - b) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
 - c) tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya, terkecuali untuk jabatan Ketua Umum tidak lebih dari tiga periode menjadi pengurus KNPI;
 - d) tidak rangkap jabatan pada jenjang struktur kepengurusan KNPI/MPI lainnya;
 - e) sedang/pernah terlibat dalam kepengurusan OKP dan atau organisasi

- i. kepemudaan lainnya;
- f) pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, stidak-tidaknya tingkat dasar;
- g) memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi;
- h) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara;
- i) menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;
- j) berdomisili di sekitar Jabotabek, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan DPP KNPI.

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP KNPI, maka selain memenuhi pasal 4 ayat 2 AD/ART seperti yang tertera di atas, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua Umum;
- 2) Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta;
- 3) Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis sekurang-kurangnya satu Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi serta sekurang-kurangnya satu dari OKP tingkat

nasional yang berhimpun dalam KNPI;

- 4) Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan dalam memajukan KNPI dihadapan peserta Kongres.

b. Proses Kehadiran Pemimpin Organisasi

Sebagai sebuah organisasi yang telah berdiri sejak 1973, KNPI telah berhasil menjadi tempat berhimpun pemuda-pemuda yang tergabung dalam berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai harapan bangsa yang tentunya memberi kontribusi nyata terhadap perkembangan bangsa ini. Sebut saja kehadirannya telah berhasil memunculkan para tokoh yang sekarang menjadi tokoh-tokoh penting di Indonesia yang mana dulunya adalah pemimpin-pemimpin

KNPI. Semua keberhasilan ini tentunya karena KNPI sangat selektif dalam menyeleksi calon-calon ketuanya.

c. Cara Kepemimpinan

Seorang ketua tentunya bertanggung jawab dalam terlaksananya kegiatan organisasi. Oleh karenanya, ketua harus selalu mengajak, mengawasi, dan mengayomi setiap langkah yang diambil oleh organisasi sesuai peraturan organisasi yang telah tertulis dalam AD/ART organisasi hasil Kongres-XII tahun 2008 dan jangan sampai menimbulkan masalah yang tidak diinginkan baik internal maupun eksternal.

Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Harian Dewan Pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu.

3. Sistem Nilai KNPI

a. Sesuatu yang Dianggap Baik/Buruk, Benar/Salah

Sistem nilai dalam KNPI (peraturan organisasi KNPI tentang disiplin organisasi), yaitu bagaimana peraturan-peraturan yang harus dita'ati oleh setiap pengurus maupun anggota KNPI, dan sanksi apa saja yang akan mereka terima seandainya mereka melanggar disiplin yang telah ditetapkan. Semua itu diatur oleh Peraturan Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia tentang disiplin organisasi.

Kongres X Pemuda/KNPI tahun 2002 di Bekasi memberi amanat kepada DPP KNPI untuk menyempurnakan dan melaksanakan hasil-hasil kongres. Hasil-hasil Kongres ini mesti disosialisasikan kepada semua pihak, khususnya KNPI secara struktural, sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Peraturan Organisasi dan Tata Kerja DPP KNPI ini lahir dari evaluasi terhadap dinamika organisasi pada periode sebelumnya dan melalui proses diskusi secara intensif oleh Bidang Organisasi dan

Antar Lembaga, selanjutnya disahkan dalam rapat pleno DPP KNPI. Proses ini mempertimbangkan berbagai aspek yang dipandang sangat terkait dengan gerak dan langkah KNPI, khususnya KNPI sebagai wadah berhimpun OKP. Prinsip-prinsip ini kemudian diharapkan dapat tercermin dalam kinerja organisasi, sehingga harapan pemuda terhadap KNPI sebagai saluran aspirasi kaum muda dapat terwujud. Peraturan organisasi tentang disiplin organisasi adalah sebagai berikut:

b. Disiplin Organisasi

Disiplin adalah setiap perilaku positif yang berdasarkan kepada keta'atan kepatuhan serta tunduk kepada peraturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu. Disiplin berarti juga kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap ta'at walaupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun. Dalam kaitan dengan Disiplin Organisasi KNPI, peraturan yang dimaksud adalah konstitusi organisasi yang meliputi AD/ART, Peraturan Organisasi dan seterusnya, perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta etika dan norma-norma kesusilaan yang umum. Tidak berdisiplin berarti melakukan pelanggaran dan pasti akan terkena sanksi. Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya:

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi, ketentuan organisasi lainnya; perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta etika, norma-norma susila umum lainnya yang berakibat menghambat kinerja organisasi KNPI dan atau mencemarkan nama baik organisasi KNPI. Jenis-jenis pelanggaran dalam KNPI:

- 1) Pelanggaran terhadap Konstitusi Organisasi, meliputi antara lain :
 - a) AD/ART KNPI
 - b) Peraturan Organisasi
 - c) Ketentuan-ketentuan Organisasi lainnya
- 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang berlaku, melakukan tindakan-tindakan hukum di bidang kriminal

yang berakibat jatuhnya vonis pidana oleh pengadilan dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

- 3) Pelanggaran terhadap Etika Organisasi., antara lain:
 - a) Melanggar azas kepatuhan
 - b) Mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan terlebih dahulu.
 - c) Merusak citra serta nama baik organisasi.
- 4) Pelanggaran Moral, yaitu:
 - a) Melakukan perbuatan tercela.
 - b) Melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berakibat merugikan nama baik organisasi yang terbukti secara hukum.

b. Sanksi

Sanksi adalah setiap tindakan positif yang diambil oleh organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja anggota dan organisasi dan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan nama baik organisasi KNPI. Sanksi didasarkan kepada :

- 1) Jenis Pelanggaran
- 2) Frekuensi (seringnya/pengulangan) pelanggaran.
- 3) Besar kecilnya pelanggaran
- 4) Unsur kesengajaan.

Jenis-jenis sanksi, antara lain:

- 1) Teguran atau peringatan.
- 2) Pemberhentian sementara (skorsing).
- 3) Pemecatan
- 4) Teguran atau peringatan dilakukan :
 - a) Kepada anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatan kepengurusan organisasi.
 - b) Teguran atau peringatan tersebut di atas dilakukan secara lisan maupun tertulis.

- 5) Sanksi pada ayat (2) dan ayat (3) diatas dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Propinsi, setelah diberikan kesempatan untuk membela diri selanjutnya segera diambil keputusan dalam bentuk :
 - a) Membatalkan pemberhentian sementara.
 - b) Menetapkan pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
 - c) Memecat

4. Kegiatan Rutin KNPI

a. Perekrutan Anggota

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) BAB I pasal 1 tentang syarat-syarat keanggotaan adalah sebagai berikut: Yang menjadi anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah terdaftar secara sah sesuai dengan persyaratan.

Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah:

- 1) Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia
- 2) Permufakatan Pemuda Indonesia
- 3) AD/ART
- 4) Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi (PPKNO)

Persyaratan Khusus OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah:

- 1) OKP tingkat Nasional memiliki kepengurusan lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) jumlah provinsi yang masing-masing dilegitimasi dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi di atasnya sesuai dengan ketentuan organisasi bersangkutan dan tidak melampaui masa jabatannya.
- 2) OKP tingkat Provinsi memiliki kepengurusan lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) jumlah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi bersangkutan yang masing-masing dilegitimasi dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi di atasnya sesuai dengan ketentuan organisasi bersangkutan dan tidak melampaui masa jabatannya.
- 3) OKP tingkat Kabupaten/Kota telah berada di daerah yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dilegitimasi dalam bentuk Surat

Keputusan oleh instansi di atasnya sesuai dengan ketentuan organisasi yang bersangkutan.

- 4) OKP yang dalam AD/ART yang benar-benar mencantumkan orientasi kemasyarakatan.

Selanjutnya adalah pasal 2 yang membahas tentang penerimaan dan pengesahan anggota baru. Penerimaan anggota dilakukan setelah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini. Pengesahan anggota dilakukan dengan jalan:

- 1) Bagi calon anggota di Tingkat Pusat, disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- 2) Bagi calon anggota di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, disahkan oleh Dewan Pengurus Provinsi/Kota/ Kabupaten.
- 3) Bagi calon anggota di Tingkat Kecamatan, disahkan oleh Pengurus Kecamatan

OKP yang mengikuti Kongres/Musprop/Muskab untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai peninjau dan akan menjadi peserta penuh pada Kongres/Musprop/ Muskab berikutnya.

b. Kegiatan Rutin

1) Kongres

Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun yang diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Pusat. Materi yang dibahas akan dipersiapkan terlebih dahulu melalui Rapat Kerja Nasional. Keputusan Kongres berwenang menentukan hal-hal berikut:

- a) Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b) Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Laporan Majelis
 - a. Pemuda Indonesia Pusat;
- c) Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO), serta kebijakan-kebijakan organisasi lainnya;

- d) Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat KNPI dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Pusat periode berikutnya.

2) Kongres Luar Biasa (KLB)

Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi. Wewenang Kongres Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar seperti yang tertulis diatas.

3) Musyawarah Provinsi

Musyawarah Provinsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI di tingkat Provinsi. Sama halnya dengan Kongres ditingkat pusat, Musyawarah Provinsi juga diadakan 3 tahun sekali, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Daerah, dan materinya terlebih dahulu dipersiapkan ada Rapat kerja Provinsi. Keputusan Musda berwenang memutuskan hal-hal berikut:

- a) Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD KNPI Provinsi dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia Prfovinsi.
- b) Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (PPKPO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO).
- c) Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi.

4) Rapat Pimpinan Nasional

Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum yang kedudukannya setingkat di bawah Kongres dan Kongres Luar Biasa. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 kali diantara 2 kongres. Hasil Rapat Pimpinan Nasional berwenang memutuskan hal-hal berikut:

- a. Memutuskan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- b. Mempersiapkan rancangan materi, menetapkan tempat, waktu, dan tema, serta merekomendasikan peserta kongres.

5) Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekurang-kurangnya diadakan sekali diantara dua kongres dan menjadi tanggung jawab penuh Dewan Pengurus Pusat. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketentuan kongres, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Pusat.

c. Kegiatan Tidak Rutin

KNPI merupakan wadah bagi para pemuda yang ada di Indonesia, sehingga pemuda harus menjadi tolak ukur pembangunan serta kemajuan di Indonesia ini. Selain dari kegiatan-kegiatan rutin seperti yang tertulis diatas, KNPI juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang ditujukan bermanfaat bagi masyarakat.

1. Kegiatan Bakti Sosial

Kegiatan bakti sosial merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan tidak rutin yang sering dilakukan oleh KNPI, baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten, maupun kecamatan. Kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa KNPI juga mempunyai kontribusi dalam pembangunan di Indonesia ini. Sebagai contoh, KNPI Kota Jayapura mengadakan bakti sosial dengan membersihkan ruas jalan irian-wamena. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menyambut hari sumpah pemuda, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, anggota TNI, Guru-guru dan masyarakat sekitar.



2. Kegiatan Donor Darah

Dalam menyambut hari sumpah pemuda, DPD KNPI Sumatera barat mengadakan serangkaian kegiatan upacara, penyerahan piagam dan tabanas oleh Gubernur Irwan Prayitno kepada Pemuda Pelopor dan penyerahan Air 2 liter, tanah 8 liter kepada pengurus DPP KNPI untuk pembangunan Monumen Nasional Pemuda yang bahannya diambil secara simbolis dari tanah dan air dari semua provinsi di Indonesia. Dan diakhiri dengan kegiatan donor darah oleh DPD KNPI Sumbar melalui Bidang kesehatan Masyarakat yang dipimpin Drg.Afando Eakrdo diruangan kantor Gubernur Sumatra Barat.



3. Kegiatan Jalan Sehat dan Bakti Sosial Kepada Anak Yatim

Kegiatan ini dilakukan oleh KNPI kecamatan Kersamanah dalam rangka memperingati tahun baru hijriah. Rentetan acaranya dimulai dengan jalan sehat, dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada anak yatim dan tabligh akbar.



Keterangan

1. Icon/Symbol Kebudayaan

1. Vandel KNPI

Yang terdapat pada Vandel:

- a.** Lambang.
- b.** Tulisan-tulisan yang menyebut pengurus KNPI, tingkat Pusat maupun Daerah.
- c.** Tulisan-tulisan yang menggambarkan kegiatan
- d.** Tulisan-tulisan yang berbahasa asing (inggris) hanya terdapat pada tingkat Pusat.
- e.** Tentang bentuk, ukuran, warna, bahan serta rumbai dari pada vandel diserahkan kepada kreatifitas masing-masing, baik Pusat maupun Daerah.

Tata cara penggunaan Vandel: Vandel digunakan sebagai souvenir dan dapat dihadiahkan bila dianggap perlu.

2. Badge KNPI

- a.** Lambang harus terdapat pada badge.
- b.** Ukuran badge diserahkan kepada masing-masing Daerah maupun Pusat. Tata cara penggunaan badge.
- c.** Badge harus digunakan pada jaket.
- d.** Letak badge pada dada sebelah kiri.



3. Jas/Jaket KNPI

- a. Warna : sama seperti warna biru pada lambang
- b. Bahan : Bebas

Model:

- a. Jas untuk upacara resmi.
- b. Jaket untuk acara tidak resmi. Olahraga dll.
- c. Jas/jaket digunakan bilamana dianggap perlu.

4. Bendera KNPI

- a. Ukuran lebar dan panjang bendera adalah 3 : 4
- b. Warna bendera ialah biru (bagian atas) dan putih (bagian bawah) dengan lambang KNPI ditengah-tengah.
- c. Bendera berukuran 90 x120 cm.
- d. Dipergunakan pada peristiwa yang digolongkan bersifat upacara resmi baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internal organisasi.
- e. Pada peristiwa-peristiwa yang biasa, bendera tidak terikat pada ukuran 90 x 120 cm, namun harus tetap pada perbandingan 3 : 4.

5. Arti Lambang KNPI

Keterangan Warna:

- Orang : Coklat
- Daun dan Huruf KNPI : Kuning
- Dasar bagian bawah : Biru
- Dasar bagian atas : Putih
- Garis Pinggir : Hitam



Pengertian Lambang:

- a. **Bentuk Figur**, Perlambang pemuda menatap masa depan dengan optimis.
- b. **Memegang Daun Berhelai 5**, Perlambang akan setiap tindakan perbuatan berpegang pada asas “Pancasila” dan juga simbol kemakmuran.
- c. **Figur yang mendorong**, Mengartikan maju, kedinamisan, kemauan, bekerja membangun.
- d. **Huruf-huruf KNPI yang menyatu**, Persatuan dan kegotongroyongan, kesatuan tindakan dalam KNPI.
- e. **Bentuk**, Mengartikan perisai, yaitu ketahanan pemuda terhadap pengaruh luar.

Pengertian warna:

- a. **Biru**, mengartikan lautan Indonesia yang mengelilingi Kepulauan Nusantara.
- b. **Coklat muda**, manusia, bumi Indonesia.
- c. **Kuning muda/kehijau-hijauan**, Warna daun muda yang menggambarkan generasi muda harapan bangsa dan sifat pemuda itu sendiri yang penuh optimis dan harapan.

6. Istilah-istilah khusus:

- Kelompok Cipayung



Kelompok Cipayung merupakan forum bersama 5 organisasi mahasiswa: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang

disepakati pembentukannya di Cipayung, pada tanggal 22 Januari 1972. Kelompok Cipayung adalah penggagas berdirinya wadah organisasi ini yang kemudian menjadi salah satu penopang kekuasaan Orde Baru. Kelompok Cipayung ini menjadi terkenal karena pertemuan mereka dilaksanakan di Cipayung Bogor, melahirkan Deklarasi Pemuda Indonesia pada 23 Juli 1973 sebagai cikal bakal lahirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

- Kongres-Kongres Luar Biasa

Kongres adalah agenda DPP KNPI setiap 3 tahun sekali untuk memutuskan berbagai kebijakan mengenai organisasi untuk periode 3 tahun berikutnya. Kongres Luar Biasa diadakan apabila dipandang perlu oleh minimal $\frac{1}{2}$ anggota atau lebih, dan wewenang hasil KLB sama dengan wewenang hasil Kongres.

- Kaderisasi

Kegiatan rutin terencana oleh pengurus organisasi untuk mencetak pemuda baru yang akan melanjutkan kegiatan dan aktifitas organisasi.

- Keberhimpunan/Berhimpun

Istilah yang digunakan dalam organisasi dalam menyebut OKP yang ikut bergabung ke dalam KNPI.

KESIMPULAN

No	Aspek-aspek	Kesimpulan
1.	Aspek Sosial Politik	Dualisme KNPI pasca kongres Ancol dan kongres Bali melahirkan dua kubu KNPI kubu Ahmad Zulfakar dan Taifan Eko Nugroho sehingga menimbulkan perpecahan dan masalah internal. Namun <u>perubahan sosial yang tidak terencana</u> tersebut <u>dapat dikendalikan</u> melalui Kongres Luar Biasa dan Pengukuhan DPP KNPI pada Tahun 2011 sehingga KNPI dapat bersatu kembali dibawah kepemimpinan Bung Taufan Eko Nugroho.
2.	Aspek Ideolog/Kepemimpinan	<u>Kriteria menjadi pemimpin</u> dalam KNPI tertulis dalam AD/ART tentang kepengurusan. Selain harus memenuhi syarat menjadi anggota yang menjadi persyaratan umum, juga harus memenuhi persyaratan menjadi ketua, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Tidak lebih dari dua periode jadi ketua.2. Didukung minimal 20% suara peserta.3. Mendapat Rekomendasi.4. Menyampaikan Riwayat Hidup. <u>Cara pemimpin hadir/muncul</u> karena prestasi pribadi dengan track record yang baik dan beranio mencalonkan diri jadi ketua sampai berhasil dipilih. <u>Cara pemimpin memimpin anggota</u> harus sesuai dengan program kerja ketua

organisasi. Jika tidak, maka ketua akan diberhentikan dan diganti dengan yang baru melalui KLB.

3. Sistem Nilai

Sistem nilai dalam organisasi KNPI merupakan serangkaian peraturan-peraturan atau disiplin yang telah disusun rapi dalam konstitusi organisasi yang meliputi AD/ART, Peraturan Organisasi dan seterusnya, perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta etika dan norma-norma kesusilaan yang umum. Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi dalam KNPI adalah sebagai berikut:

Pelanggaran

- Pelanggaran terhadap Konstitusi Organisasi
- Pelanggaran terhadap Etika Organisasi, dll.

Sanksi

- Teguran (peringatan)
- Skorsing, pemecatan, dll.

4. Kegiatan Rutin KNPI

Kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KNPI, diantaranya:

Perekrutan Anggota baru, yaitu dengan cara pemilihan, dan pelantikan anggota baru yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya setelah masa jabatan yang lama sudah habis. Selanjutnya adalah Kongres, Kongres luar biasa, Musyawarah Provinsi, Rapat Pimpinan Nasional,

Rakernas, dll. Serta KNPI juga biasa mengadakan kegiatan-kegiatan tidak rutin yang pastinya bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti bakti sosial, donor darah, jalan sehat dsb.

5. Icon/Symbol Kebudayaan Icon/Symbol Kebudayaan KNPI berupa atribut-atribut dan berbagai istilah khusus. Contoh Atribut-atribut adalah sebagai berikut:

1. Vandel, dan lambang KNPI
2. Badge, Bendera, serta Jas KNPI (biru)

Sedangkan, istilah-istilah khususnya sebagai berikut:

1. Kelompok Cipayung
2. Kongres-KLB
3. Kaderiasi, dan
4. Keberhimpunan/Berhimpun

Pengembangan Deskripsi Perubahan Sosial KNPI

Perubahan sosial yang terdapat di KNPI:

1. Dualisme Kepemimpinan KNPI pasca Kongres Bali dan Kongres Ancol yang melahirkan dua kubu KNPI. Yang pertama dipimpin oleh Taufan Eko Nugroho dan yang kedua dipimpin oleh Akbar Zulfakar.

Faktor Pendukung (Internal dan Eksternal) antara lain:

1. Kemauan seluruh Majelis Pemuda Indonesia, OKP dan DPD KNPI seluruh Indonesia untuk mewujudkan kembali KNPI yang satu seperti sebelumnya agar bisa memberi kontribusi lebih kepada bangsa ini dari pada mengurus problematika internal yang tidak ada manfaatnya.

Faktor Penghambat (Internal dan Eksternal) antara lain:

1. Sulitnya integrasi, lemahnya hukum yang berlaku, dan tidak ada kubu yang mau mengalah atas aib ini sehingga sulit untuk melakukan pengukuhan organisasi menjadi satu organisasi yang utuh seperti sedia kala.

KNPI menyikapi berbagai masalah diatas tentunya sangat hati-hati, pelan-pelan tapi pasti, dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pengukuhan organisasi namun tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga akhirnya pada tanggal 25-28 oktober 2011 melalui Kongres Luar Biasa dualisme kepemimpinan ini berhasil dikukuhkan dan memilih Bung Taufan Eko Nugroho sebagai ketua yang sah KNPI periode 2011-2014.

PENUTUP

Dari berbagai uraian tersebut diatas, tentunya dapat diambil kesimpulan bahwa KNPI merupakan salah satu organisasi yang mempunyai peran aktif dalam memperjuangkan nasib bangsa dan negara Indonesia dewasa ini. Kita harapkan bahwa kedepannya akan lebih banyak lagi kontribusi-kontribusi serta kreasi yang variatif dan inovatif dan yang terpenting berguna bagi kita semua baik dalam hal sosial, politik, ataupun keagamaan yang bisa membangkitkan kembali semangat 45 Bangsa ini dan menghilangkan segala bentuk kekacauan yang semakin lama menjerumuskan bangsa ini kedalam keterpurukan. Terutama lagi bisa membangkitkan semangat para pemuda-pemuda, karena sesungguhnya nasib masa depan bangsa ini di tangan pemuda-pemudanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in Time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca : Cornell University Press.
- Hardjito. 1952. *Risalah Gerakan Pemuda*. Jakarta : Pustaka Antara
- Sihombing, ODP. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta : Sinar Djaya.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Musthofa, Sh.,Suryandari & Tutik Mulyati. 2009. *Sejarah Untuk SMA/MA Program IPA*.
- Laurencius Simanjuntak. 2012. Dimanakah naskah asli Supersemar?. From <http://www.merdeka.com/peristiwa/di-manakah-naskah-asli-supersemar.html>, 31 Agustus 2014